

Katalog BPS : 7203005.51

STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-BALI 2009-2013



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI BALI**

<http://bali.bps.go.id>



**STATISTIK KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
SE-BALI 2009-2013**

<http://bali.bps.go.id>



STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-BALI 2009 – 2013

Katalog BPS : 7203005.51
No. Publikasi : 51540.1409
Ukuran Buku : 14,8 cm x 21 cm
Jumlah Halaman : xii + 65 halaman
Naskah : BPS Provinsi Bali

Tim Penyusun Naskah :

- Penanggung Jawab Umum : Panusunan Siregar
- Penanggung Jawab Teknis : Amirudin
- Editor : I Gusti Ayu Sri Hardani
- Penulis : Ni Made Inna Dariwardani
- Pengolah Data : Ni Made Inna Dariwardani

Penyunting : Bidang Statistik Distribusi
Gambar Kulit : I Gede Arya Agus Yogantara
Diterbitkan Oleh : BPS Provinsi Bali

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya

KATA PENGANTAR

Guna menjawab kebutuhan akan data statistik keuangan pemerintah kabupaten/kota se-Bali, Badan Pusat Statistik Provinsi Bali untuk pertama kalinya menerbitkan Publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Bali 2009 – 2013. Data yang disajikan dalam publikasi ini merupakan hasil kegiatan Survei Statistik Keuangan Pemerintah Daerah yang dilakukan setiap tahunnya oleh BPS Provinsi Bali.

Publikasi ini menyajikan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Realisasi APBD pemerintah kabupaten/kota se-Bali dalam kurun waktu 2009 – 2013 yang dilengkapi pula dengan ulasan mengenai perkembangan keuangan pemerintah kabupaten/kota se-Bali sepanjang tahun 2009 – 2013. Publikasi ini diharapkan dapat menjadi rujukan berbagai pihak dalam menelaah kondisi keuangan pemerintah kabupaten/kota di Bali.

Kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan publikasi ini dimasa mendatang.

Denpasar, September 2014
Badan Pusat Statistik Provinsi Bali,
Kepala



Panusunan Siregar



PANGAWEJANG STATISTIK

1. Membangun itu sulit, tetapi jauh lebih sulit melaksanakan pembangunan tanpa dukungan data statistik.
2. Data yang baik, akurat, bebas bias, dan terpercaya adalah data yang dikumpulkan berdasarkan metodologi statistik yang jelas dan benar.
3. Jangan pernah mengharapkan bahwa setiap data yang dikumpulkan itu, seratus persen benar sekalipun metodologi statistiknya sudah benar, karena data itu masih dikumpulkan oleh manusia.
4. BPS dalam setiap melakukan pengumpulan data, memiliki prinsip bahwa data yang dikumpulkan itu pasti mengandung kesalahan, tetapi dalam melaporkan dan mendiseminasikan datanya BPS tidak melakukan kebohongan.
5. Data bagaikan Kompas dan Pelita.

copyright@panusunan_siregar

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	iii
PANCAWEJANG STATISTIK.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan.....	3
1.3 Ruang Lingkup.....	3
II. METODOLOGI	
2.1 Ruang Lingkup.....	5
2.2 Metode Pengumpulan Data.....	5
2.3 Konsep dan Definisi.....	5
III. ULASAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-BALI 2009 – 2013	
3.1 Gambaran Umum.....	15
3.2 Pendapatan Daerah.....	17
3.3 Belanja Daerah	21
LAMPIRAN TABEL.....	25

<http://bali.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jembrana Tahun 2009 – 2013.....	26
Tabel 2. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tabanan Tahun 2009 – 2013.....	28
Tabel 3. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Badung Tahun 2009 – 2013.....	30
Tabel 4. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gianyar Tahun 2009 – 2013.....	32
Tabel 5. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klungkung Tahun 2009 – 2013.....	34
Tabel 6. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangli Tahun 2009 – 2013.....	36
Tabel 7. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karangasem Tahun 2009 – 2013.....	38
Tabel 8. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buleleng Tahun 2009 – 2013.....	40
Tabel 9. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Denpasar Tahun 2009 – 2013.....	42
Tabel 10. Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jembrana Tahun 2009 – 2013.....	44
Tabel 11. Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tabanan Tahun 2009 – 2013.....	46
Tabel 12. Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Badung Tahun 2009 – 2013.....	48
Tabel 13. Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gianyar Tahun 2009 – 2013.....	50
Tabel 14. Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klungkung Tahun 2009 – 2013.....	52

Tabel 15.	Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangli Tahun 2009 – 2013.....	54
Tabel 16.	Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karangasem Tahun 2009 – 2013...	56
Tabel 17.	Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buleleng Tahun 2009 – 2013.....	58
Tabel 18.	Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Denpasar Tahun 2009 – 2013.....	60
Tabel 19.	Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota Se-Bali Tahun 2009 – 2013.....	62
Tabel 20.	Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota Se-Bali Tahun 2009 – 2013...	64

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam era otonomi daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan penuh untuk mengelola keuangan daerah. Hal terkait dengan asumsi bahwa pemerintah daerah-lah yang lebih mengerti kondisi di daerahnya sehingga dapat mengatur alokasi anggaran agar tepat sasaran. Anggaran pemerintah daerah tersebut tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang juga merupakan instrumen fiskal pemerintah daerah dalam mengendalikan perekonomian di wilayahnya. Melalui instrumen APBD pemerintah daerah dapat melakukan stimulus terhadap perekonomian di wilayahnya guna memicu perkembangan perekonomian di wilayah tersebut.

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang diubah terakhir kali dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, terdapat enam fungsi APBD yang wajib diterapkan dalam setiap penyusunan APBD. Pertama, fungsi otorisasi yang bermakna bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk merealisasi pendapatan dan belanja pada tahun bersangkutan. Tanpa dianggarkan dalam APBD sebuah kegiatan tidak memiliki kekuatan untuk dilaksanakan. Kedua, fungsi perencanaan yang bermakna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Ketiga, fungsi pengawasan yang mengandung makna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintah daerah. Keempat, fungsi alokasi mengandung makna bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan pemborosan sumberdaya, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian daerah. Kelima, fungsi distribusi yang memiliki makna bahwa kebijakan-kebijakan dalam penganggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Keenam, fungsi stabilitasi yang memiliki makna bahwa anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Sejalan dengan fungsi APBD dalam hal perencanaan, pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun daerah serta para pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya diharapkan dapat merumuskan kebijakan yang tepat berdasarkan data potensi suatu wilayah dari sisi pendapatan dan pengeluarannya. Potensi dari sisi pendapatan merupakan tolak ukur suatu pemerintahan dalam menentukan kebijakan berdasarkan besaran pendapatan yang di peroleh dalam suatu daerah. Jika pendapatannya tinggi, tentunya pemerintah memiliki keleluasaan yang lebih tinggi dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dilakukan, demikian pula sebaliknya. Sementara itu, dari sisi pengeluaran dapat dilihat potensi pengeluaran pemerintah yang merupakan tolak ukur untuk melihat kemana pendapatan daerah akan dibelanjakan. Prioritas – prioritas kebijakan dapat disusun sehingga belanja daerah akan lebih efektif dan efisien. Perencanaan kebijakan yang tepat tentunya akan membawa dampak yang positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Terkait dengan fungsi APBD dalam hal pengawasan, data APBD maupun realisasi APBD dibutuhkan dalam evaluasi kebijakan pemerintah daerah. Berbagai rasio keuangan dapat disusun berdasarkan data APBD dan realisasinya yang dapat digunakan berbagai pihak untuk menilai kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan di wilayahnya. Rasio – rasio keuangan tersebut antara lain rasio ketergantungan daerah, rasio belanja pegawai terhadap total belanja, rasio belanja modal terhadap total belanja, dan rasio efektivitas keuangan daerah. Rasio – rasio keuangan tersebut dapat digunakan untuk menilai sejauh mana pengelolaan APBD dilakukan oleh pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan daerah tentunya berkorelasi positif dengan keberhasilan pembangunan di wilayah tersebut karena dengan pengelolaan yang baik maka keuangan daerah dapat secara efektif dan efisien dialokasikan guna kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya.

Publikasi ini disusun guna memenuhi kebutuhan akan data statistik keuangan terkini Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali. Disajikan pula gambaran yang komprehensif atas anggaran daerah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali tahun 2009 – 2013 serta analisis kondisi fiskal atau keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali berdasarkan data APBD maupun realisasi APBD tahun anggaran 2009 – 2013.

1.2. Tujuan

Tujuan penyusunan publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Bali 2009 – 2013 adalah untuk menyajikan dan menganalisis data keuangan (APBD dan realisasi APBD) pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali tahun 2009 – 2013.

1.3. Sistematika Penulisan

Publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Bali 2009 – 2013 merupakan salah satu dari berbagai publikasi yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. Sistematika penulisan publikasi ini adalah sebagai berikut :

1. BAB I Pendahuluan, yang terdiri dari Latar Belakang, Tujuan, dan Sistematika Penulisan.
2. BAB II Metodologi, yang terdiri dari Ruang Lingkup, Metode Pengumpulan Data, dan Konsep/Definisi
3. BAB III Ulasan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Bali 2009 – 2013
4. Lampiran Tabel-tabel

<http://bali.bps.go.id>

II. METODOLOGI

2.1. Ruang Lingkup

Data yang ditampilkan dalam publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Bali 2009 – 2013 meliputi data realisasi pendapatan dan belanja Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali Tahun 2009 – 2013 dan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali Tahun 2009 – 2013. Kabupaten/Kota yang dicakup adalah seluruh Kabupaten/Kota di Bali yaitu Kabupaten Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Klungkung, Bangli, Karangasem, Buleleng, serta Kota Denpasar. Data yang dicakup adalah data anggaran/realisasi anggaran dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun yang bersangkutan.

2.2. Metode Pengumpulan Data

Data pendapatan dan belanja kabupaten/kota dikumpulkan dari Bagian Keuangan Kantor Bupati/Walikota di seluruh Bali melalui kegiatan Survei Statistik Keuangan Pemerintah Daerah. Untuk mengumpulkan data tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota digunakan daftar APBD-2, sedangkan untuk mengumpulkan data tentang realisasi/ perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota menggunakan daftar K-2. Daftar tersebut diisi langsung oleh petugas dari Bagian Keuangan Kantor Bupati/Walikota (swacacah). Hasil pendataan kemudian disahkan oleh pejabat yang berwenang di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Setwilda atau Kepala Bagian Keuangan Kantor Bupati/Walikota).

2.3. Konsep dan Definisi

❖ Pendapatan Daerah

Adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.

Pendapatan Daerah terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah
2. Dana Perimbangan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

❖ **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

❖ **Pajak Daerah**

Adalah pungutan yang dilakukan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak daerah ini dapat dibedakan dalam dua kategori yaitu pajak daerah yang ditetapkan oleh peraturan daerah dan pajak negara yang pengelolaan dan penggunaannya diserahkan kepada daerah.

Penerimaan pajak daerah antara lain pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan lain-lain.

❖ **Retribusi Daerah**

Adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

❖ **Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Pendapatan yang berupa hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, terdiri dari bagian laba Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), bagian laba Lembaga Keuangan Bank, bagian laba Lembaga Keuangan Non Bank, bagian laba Perusahaan Milik Daerah Lainnya, serta bagian laba atas penyertaan modal/investasi kepada pihak ketiga.

❖ **Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terdiri dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, penerimaan bunga,

penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah (TGR), komisi, potongan dan keuntungan selisih nilai tukar rupiah, denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, denda pajak, denda retribusi, hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas social dan fasilitas umum, Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari angsuran/ cicilan penjualan, dan lain-lain.

❖ **Dana Perimbangan**

Adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

❖ **Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak**

➤ **Bagi Hasil Pajak**

Bagi hasil pajak adalah bagian daerah yang berasal dari pendapatan pajak bumi dan bangunan (PBB), pendapatan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, dan PPh Pasal 21 orang pribadi (termasuk PPh pasal 21), dan lain-lain.

➤ **Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam**

Pendapatan bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam berasal dari pendapatan sumber daya alam kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi.

❖ **Dana Alokasi Umum (DAU)**

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) dan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dalam rangka

membantu kemandirian pemerintah daerah menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat.

❖ **Dana Alokasi Khusus (DAK)**

Dana alokasi khusus (DAK) adalah dana yang disediakan kepada daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus. Ada tiga kriteria dari kebutuhan khusus seperti ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- Kebutuhan tidak dapat diperhitungkan dengan menggunakan rumus dana alokasi umum.
- Kebutuhan merupakan komitmen atau prioritas nasional.
- Kebutuhan untuk membiayai kegiatan reboisasi dan penghijauan oleh daerah penghasil.

Dengan demikian DAK pada dasarnya merupakan transfer yang bersifat spesifik untuk tujuan-tujuan yang sudah digariskan.

❖ **Lain-lain Pendapatan yang Sah**

Adalah pendapatan lainnya dari pemerintah pusat dan atau dari instansi pusat, serta dari daerah lainnya. Lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari pendapatan hibah, dana darurat, dana bagi hasil dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, dan bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

❖ **Belanja Daerah**

Adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja Daerah terdiri dari : Belanja Tak Langsung dan Belanja Langsung.

❖ **Belanja Tak Langsung**

Adalah bagian belanja yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program. Belanja tak langsung terdiri dari: belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan yang telah ditetapkan undang-undang, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi

hasil kepada provinsi/kabupaten/ kota dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan, serta belanja tak terduga.

❖ **Belanja Pegawai (Tak Langsung)**

Adalah belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Termasuk disini uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam belanja pegawai.

❖ **Belanja Bunga**

Adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung berdasarkan kewajiban pokok utang (*principal outstanding*) berdasarkan perjanjian jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

❖ **Belanja Subsidi**

Adalah belanja yang telah dianggarkan dan digunakan untuk bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu, agar harga jual produksi barang/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. Tentunya perusahaan/lembaga tersebut menghasilkan produk atau jasa untuk pelayanan masyarakat umum.

❖ **Belanja Hibah**

Adalah belanja yang telah dianggarkan untuk diberikan kepada pihak lain sebagai hibah dalam bentuk uang, barang dan atau jasa. Hibah dapat diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, pemerintah desa, perusahaan daerah/BUMN/BUMD, badan/lembaga/ organisasi swasta, ataupun kelompok masyarakat/perorangan.

❖ **Belanja Bantuan Sosial**

Adalah belanja yang telah dianggarkan untuk memberikan bantuan kepada organisasi kemasyarakatan, partai politik dan yang lainnya bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

❖ **Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa**

Adalah belanja yang telah dianggarkan sebagai dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota, kepada desa, atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

❖ **Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa**

Adalah pemberian bantuan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota, kepada pemerintah desa, atau pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan atau peningkatan kemampuan keuangan.

❖ **Belanja Tidak Terduga**

Adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

❖ **Belanja Langsung**

Adalah bagian belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah dan telah dianggarkan oleh pemerintah daerah.

❖ **Belanja Pegawai (Langsung)**

Adalah pengeluaran untuk honorarium/upah, lembur dan pengeluaran lain untuk meningkatkan motivasi dan kualitas pegawai dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

❖ **Belanja Modal**

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang nilai manfaatnya lebih dari setahun, dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Pembentukan aset tersebut meliputi pengadaan tanah, alat-alat berat, alat-alat angkutan, alat-alat bengkel, alat-alat pertanian, peralatan dan perlengkapan kantor, komputer, mebeulair, peralatan dapur, penghias ruangan, alat-alat studio, alat-alat komunikasi, alat-alat ukur, alat-alat kedokteran, alat-alat laboratorium, konstruksi jalan, jembatan, jaringan air, penerangan jalan, taman dan hutan kota, instalasi listrik dan telepon, bangunan, buku/kepuustakaan, barang seni, pengadaan hewan/ternak dan tanaman, serta persenjataan/ keamanan.

❖ **Penerimaan Pembiayaan Daerah**

Penerimaan pembiayaan daerah terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah.

❖ **Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya**

Adalah bagian penerimaan anggaran yang didapat dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

❖ **Pencairan Dana Cadangan**

Adalah Penerimaan daerah yang diperoleh dari pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

❖ **Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Adalah semua penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan oleh pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah.

❖ **Penerimaan Pinjaman Daerah**

Adalah semua penerimaan dari pinjaman daerah, termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan.

❖ **Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman**

Adalah semua penerimaan kembali dari pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya.

❖ **Penerimaan Piutang Daerah**

Adalah semua penerimaan yang berasal dari pemberian piutang daerah kepada pemerintah yang lebih tinggi maupun lebih rendah serta swasta.

❖ **Pengeluaran Pembiayaan Daerah**

Pengeluaran pembiayaan daerah terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah.

❖ **Pembentukan Dana Cadangan**

Adalah pengeluaran untuk membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.

❖ **Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah**

Adalah pengeluaran daerah yang dialokasikan pada penyertaan modal/ investasi pemerintah daerah, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, permanen atau non permanen. Investasi ini dapat berupa deposito berjangka, pembelian Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Perbendaharaan Negara (SPN), saham, penanaman modal pada BUMN/ BUMD, pembelian obligasi dan surat utang jangka panjang.

❖ **Pembayaran Pokok Utang**

Adalah pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

❖ **Pemberian Pinjaman Daerah**

Adalah pengeluaran pemerintah daerah untuk pemberian kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau pihak ketiga.

❖ **Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan**

Pos ini digunakan untuk mengetahui pembiayaan neto, yang merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.

❖ **Rasio Ketergantungan Daerah**

Adalah rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan. Rasio ini menggambarkan tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap bantuan pihak eksternal, baik itu Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lain.

❖ **Rasio Efektivitas Keuangan Daerah**

Adalah perbandingan Realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap target Pendapatan Asli Daerah. Rasio ini menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan.

❖ **Rasio Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja Daerah**

Adalah perbandingan antara Belanja Pegawai terhadap total Belanja Daerah. Data Belanja Pegawai di sini adalah penjumlahan dari Belanja Pegawai langsung dan Belanja Pegawai tidak langsung.

❖ **Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja Daerah**

Adalah perbandingan antara Belanja Modal terhadap total Belanja Daerah.

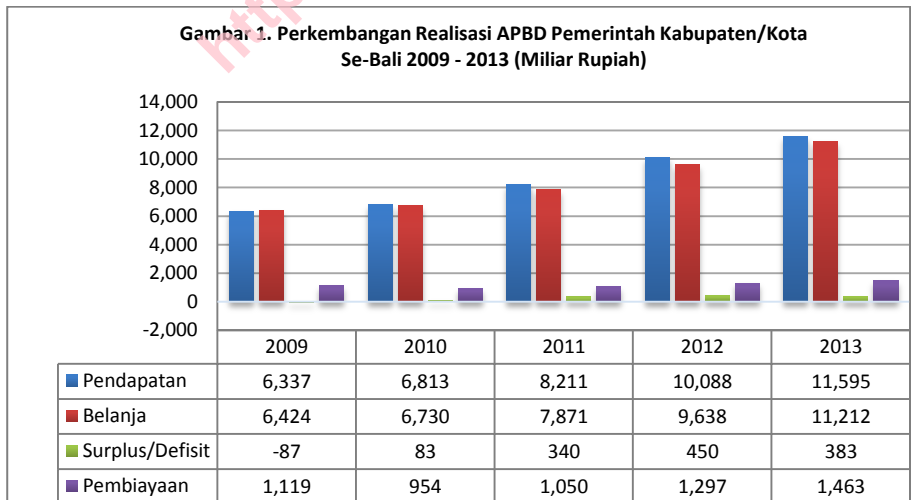
<http://bali.bps.go.id>

III. Ulasan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Bali 2009 – 2013

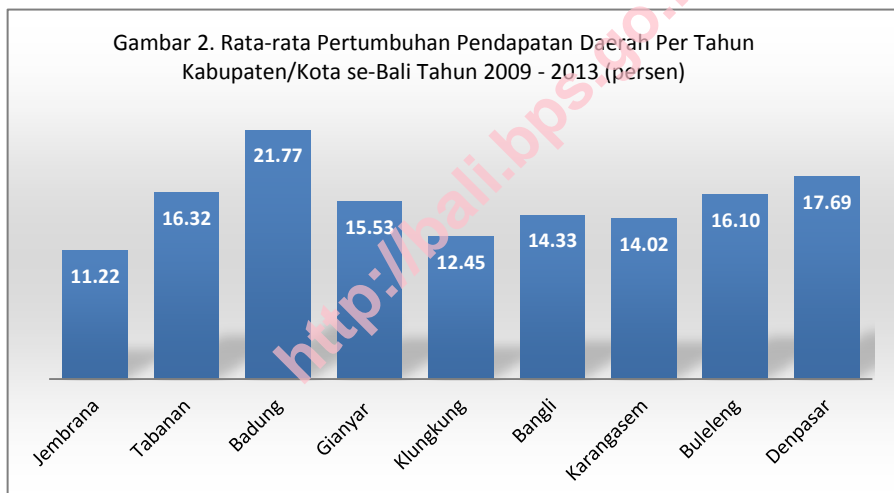
A. Gambaran Umum

Berdasarkan data realisasi APBD tahun 2009 – 2013 dari semua kabupaten/kota di Bali terlihat adanya trend kenaikan baik itu dari sisi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan daerah (gambar 1). Total pendapatan daerah mengalami kenaikan yang cukup signifikan dalam lima tahun terakhir yaitu mengalami kenaikan sebesar 83 persen atau tumbuh rata – rata 16,60 persen per tahunnya. Seiring dengan peningkatan pendapatan daerah, total belanja daerah pemerintah kabupaten/kota se-Bali juga mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Dalam rentang waktu 2009 – 2013, belanja daerah tumbuh 74,55 persen atau naik rata-rata 15 persen per tahun. Pembiayaan daerah juga mengalami kenaikan dalam lima tahun terakhir yaitu sebesar 30,75 persen. Meskipun demikian, pembiayaan daerah cenderung fluktuatif antar tahunnya seperti terlihat pada tahun 2010 dimana secara umum pembiayaan pemerintah daerah turun sebesar 14,75 persen dibanding tahun sebelumnya.

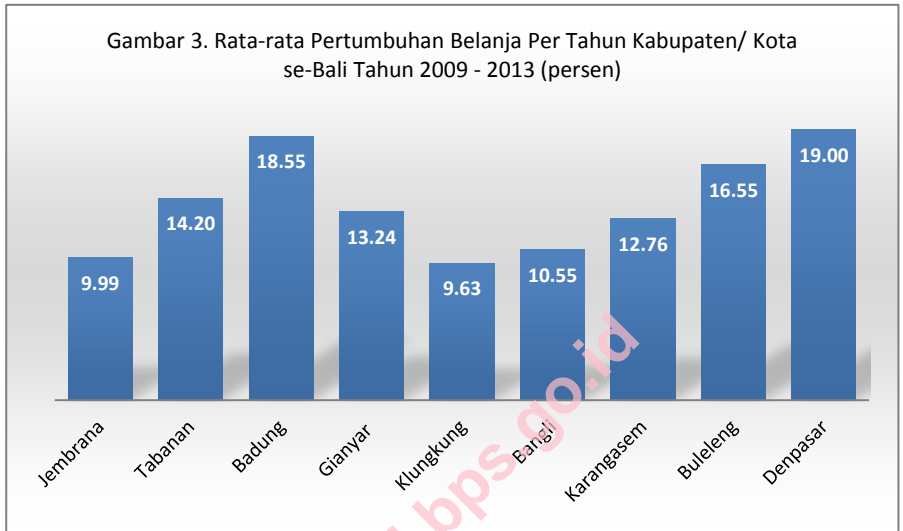
Gambar 1. Perkembangan Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Bali 2009 - 2013 (Miliar Rupiah)



Selisih antara total pendapatan dan total belanja daerah menunjukkan besaran surplus maupun defisit anggaran pemerintah daerah pada tahun berjalan. Surplus anggaran pada tahun berjalan menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola APBD dengan menjaga pendapatan daerah lebih besar dibanding belanja daerah. Dalam lima tahun terakhir, APBD pemerintah daerah kabupaten/kota se-Bali menunjukkan fluktuasi dalam surplus/defisit anggaran. Pada tahun 2009, terjadi defisit sebesar 87 miliar rupiah dari total APBD pemerintah kabupaten/kota se-Bali. Defisit ini tidak bertahan lama karena sepanjang tahun 2010 sampai dengan 2013, APBD pemerintah kabupaten/kota se-Bali mengalami surplus anggaran yang nilainya selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya.



Pertumbuhan pendapatan daerah di 10 kabupaten/kota se-Bali pada periode 2009 - 2013 menunjukkan rata-rata pertumbuhan diatas 10 persen per tahunnya. Bahkan pendapatan daerah Kabupaten Badung mencapai rata-rata sebesar 21,77 persen per tahunnya dimana pertumbuhan pendapatan ini merupakan yang tertinggi di Bali. Tingginya pendapatan daerah di Kabupaten Badung ini, tentunya tidak terlepas dari pesatnya perkembangan pariwisata khususnya di wilayah Badung Selatan. Di sisi lain, pertumbuhan pendapatan daerah terendah dalam lima tahun terakhir terjadi di Kabupaten Jembrana yaitu sebesar 11,22 persen per tahunnya.



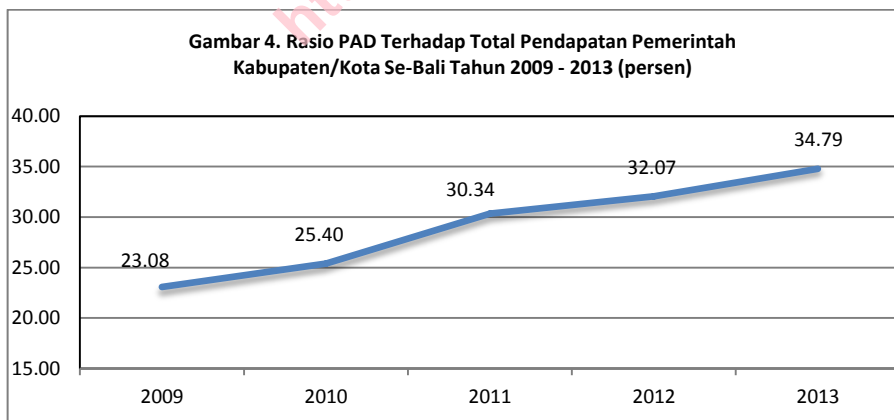
Meskipun rata-rata pertumbuhan per tahun belanja daerah tidak setinggi rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah per tahunnya, sebagian besar kabupaten/kota di Bali memiliki rata-rata pertumbuhan belanja daerah diatas 10 persen per tahunnya selama periode 2009 - 2013. Dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan belanja daerah Kota Denpasar merupakan yang tertinggi di Bali yaitu mencapai 19 persen setiap tahunnya. Pertumbuhan belanja daerah Kota Denpasar ini tercatat lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pendapatan daerahnya yang hanya sebesar 9,63 persen per tahunnya. Sedangkan Kabupaten Klungkung memiliki pertumbuhan belanja daerah yang terendah dalam periode 2009 - 2013 yaitu sebesar 9,63 persen per tahunnya.

B. Pendapatan Daerah

Salah satu poin penting dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah desentralisasi fiskal dimana pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh dalam mengatur keuangan daerahnya. Pemerintah daerah memiliki kewenangan luas untuk menggali potensi sumber-sumber pendapatan daerahnya dengan memungut pajak dan retribusi daerah atau pun tambahan pendapatan dari pengelolaan kekayaan daerah dan pendapatan asli daerah yang sah lainnya. Namun demikian,

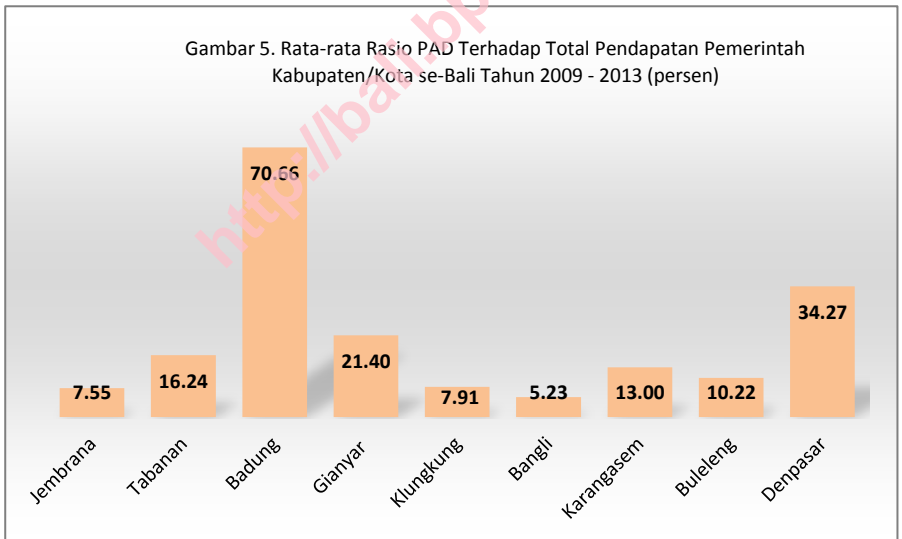
mengingat adanya pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tersebut, maka pemerintah pusat melakukan transfer dana kepada pemerintah daerah sebagai tambahan pendapatan daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan unsur yang penting dalam pendapatan daerah. Rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah menunjukkan rasio ketergantungan suatu daerah. Semakin tinggi nilai rasio PAD terhadap total pendapatan maka semakin kecil ketergantungan suatu daerah terhadap transfer dana dari pihak eksternal baik itu Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lain. Rasio antara PAD terhadap total pendapatan pemerintah kabupaten/kota se-Bali dalam kurun waktu 2009 – 2013 menunjukkan adanya kenaikan nilai rasio (gambar 4). Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan pemerintah daerah kabupaten/kota se-Bali terhadap pihak eksternal dalam pembiayaan pembangunannya semakin menurun setiap tahunnya. Namun demikian, nilai rasio PAD terhadap total pendapatan ini masih dibawah 50 persen yang berarti bahwa secara umum pemerintah kabupaten/kota di Bali masih sangat bergantung dari transfer dana dari pihak eksternal. Dengan kata lain, pemerintah daerah belum sepenuhnya mampu untuk membiayai seluruh kegiatannya mengingat sebagian besar pendapatan daerah dalam APBD masih berasal dari pihak eksternal.



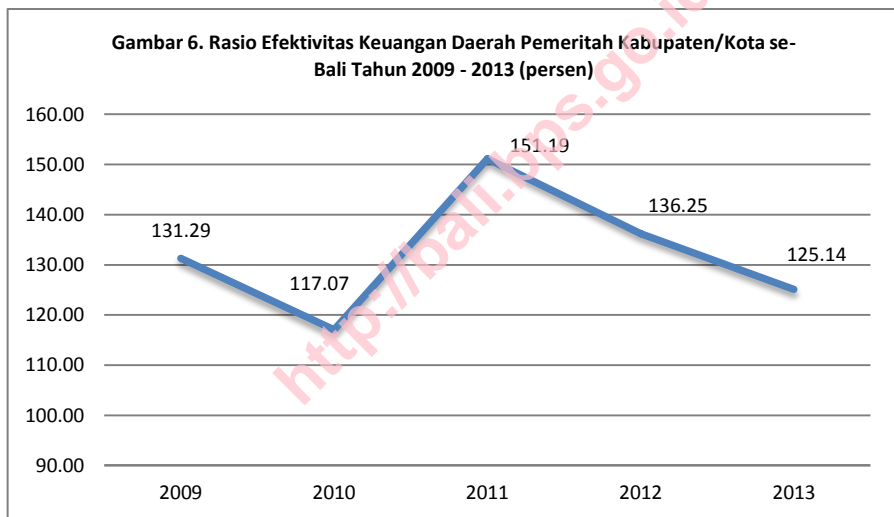
Bila dilihat rasio PAD terhadap total pendapatan pada setiap Kabupaten/Kota se-Bali terlihat rasio tertinggi tercatat pada Kabupaten Badung

(gambar 5). Rata-rata rasio PAD terhadap total pendapatan dalam rentang waktu 2009 – 2013 mencapai 70,66 persen. Hal ini menunjukkan bahwa hanya Kabupaten Badung yang memiliki kemandirian fiskal yang cukup tinggi (diatas 50 persen) dibanding kabupaten/kota lainnya. Sementara itu, secara rata-rata dalam lima tahun terakhir, Kabupaten Bangli memiliki rasio PAD terhadap total pendapatan terendah yaitu hanya 5,23 persen. Hal ini juga berarti bahwa ketergantungan Pemerintah Daerah Bangli sangat tinggi terhadap transfer dana dari pihak eksternal baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lainnya guna pendanaan kegiatan pemerintahannya yaitu mencapai rata-rata 94,77 persen. Kabupaten lain dengan rasio PAD terhadap total pendapatan dibawah 10 persen adalah Kabupaten Jembrana dan Kabupaten Klungkung. Dalam hal ini pemerintah daerah harus berupaya lebih keras lagi untuk menggali potensi-potensi PAD di wilayahnya agar dapat mengurangi ketergantungan fiskal ini.



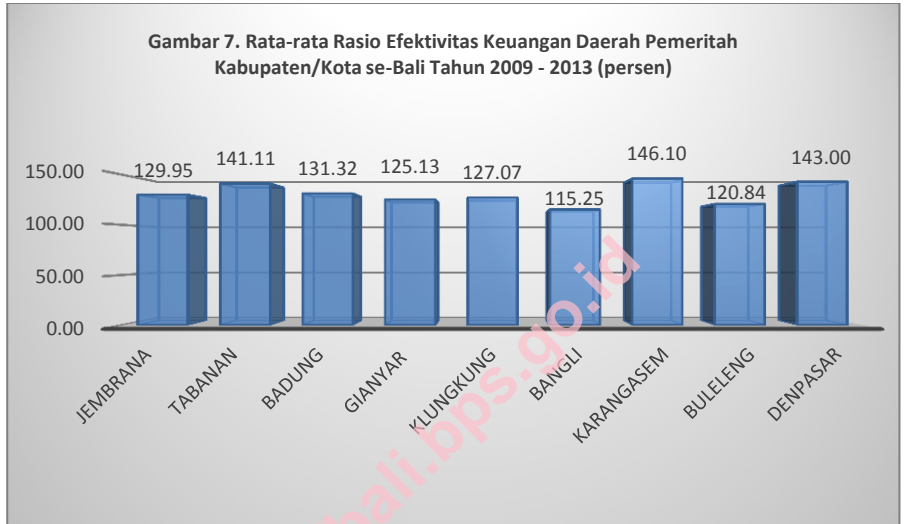
Mengingat peran PAD yang sangat penting dalam menilai kemandirian fiskal suatu wilayah, maka pemerintah daerah sedapat mungkin secara efektif mengelola PAD tersebut. Perbandingan antara Realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap target Pendapatan Asli Daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam

merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan atau dikenal sebagai rasio efektivitas keuangan daerah. Secara umum, rasio efektivitas keuangan daerah pemerintah kabupaten/kota se-Bali menunjukkan nilai diatas 100 yang berarti bahwa realisasi PAD lebih tinggi dibandingkan target PAD yang telah ditetapkan sebelumnya dalam dokumen APBD. Dalam hal ini, pemerintah daerah sudah sangat efektif dalam pengelolaan PAD-nya. Jika dilihat perkembangan rasio ini dari tahun ke tahunnya dalam kurun waktu 2009 – 2013, terlihat adanya fluktuasi seperti terlihat pada gambar 6, dimana rasio tertinggi tercatat pada tahun 2011 sebesar 151,19 persen dan terendah tercatat pada tahun 2010 sebesar 117,07 persen.



Bila dilihat rata-rata rasio efektivitas keuangan pemerintah kabupaten/kota se-Bali dalam kurun waktu 2009 – 2013, terlihat bahwa seluruh Kabupaten/Kota se-Bali memiliki nilai rasio diatas 100 yang menunjukkan bahwa pemerintah daerah sudah sangat efektif dalam merealisasikan PAD yang telah ditargetkan sebelumnya (gambar 7). Kabupaten Karangasem memiliki rasio tertinggi yaitu sebesar 146,10 persen. Sementara itu, rasio terendah tercatat untuk Kabupaten Bangli yaitu sebesar 115,25 persen. Pemerintah daerah diharapkan mampu menggali lagi potensi riil daerahnya sehingga pada akhirnya mampu

meningkatkan PAD-nya sehingga menjadi daerah dengan tingkat kemandirian yang tinggi.

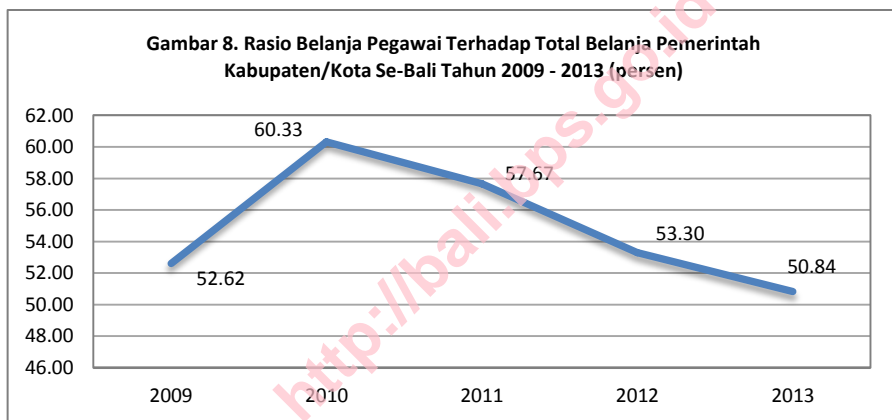


C. Belanja Daerah

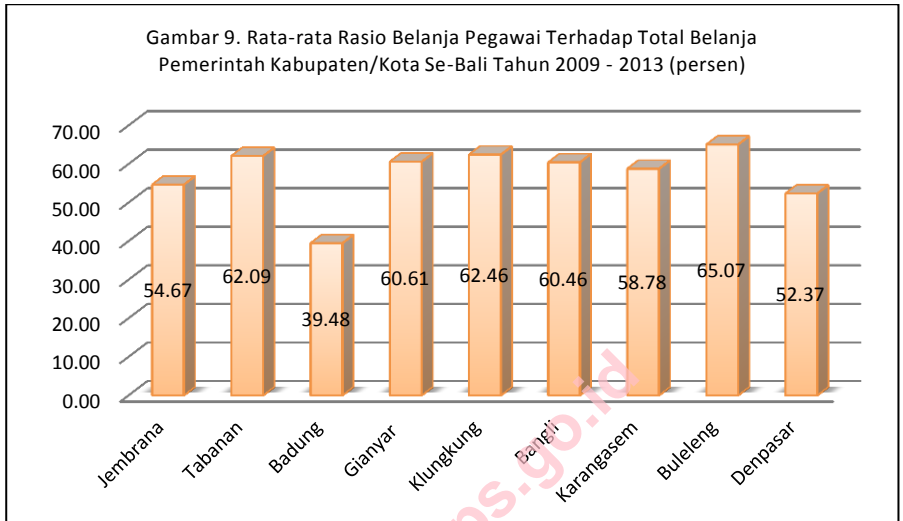
Desentralisasi fiskal yang berlaku sampai saat ini berimplikasi pada kewenangan penuh pemerintah daerah untuk mengalokasikan pendapatan daerah kedalam belanja daerah sesuai dengan program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan. Belanja daerah memiliki korelasi yang tinggi terhadap kualitas pelayanan publik di daerah bersangkutan juga sekaligus merupakan stimulus bagi pertumbuhan perekonomian di wilayah tersebut. Di dalam struktur belanja daerah akan terlihat program dan kegiatan yang menjadi prioritas utama pembangunan di daerah tersebut. Idealnya, belanja daerah seharusnya lebih banyak dialokasikan guna peningkatan akses masyarakat terhadap sumber – sumber ekonomi di wilayah tersebut sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara langsung.

Berdasarkan data realisasi APBD tahun 2009 – 2013 dari seluruh kabupaten/kota di Bali, belanja daerah masih didominasi oleh belanja pegawai. Pada rentang waktu tersebut, presentase belanja pegawai pemerintah daerah kabupaten/kota di Bali masih diatas 50 persen. Meskipun demikian terlihat trend

penurunan rasio belanja pegawai terhadap total belanja dalam empat tahun terakhir (gambar 8). Tingginya rasio belanja pegawai pada pemerintah daerah kabupaten/kota ini terkait dengan tingginya jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) khususnya guru. Meskipun banyak yang beranggapan bahwa tingginya rasio belanja pegawai terhadap total belanja berimplikasi pada rendahnya proporsi belanja daerah untuk kepentingan masyarakat secara langsung (seperti proporsi untuk belanja modal), belanja daerah khususnya untuk membayar gaji guru sudah seharusnya menjadi prioritas pemerintah daerah mengingat pendidikan merupakan salah satu ujung tombak keberhasilan pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.

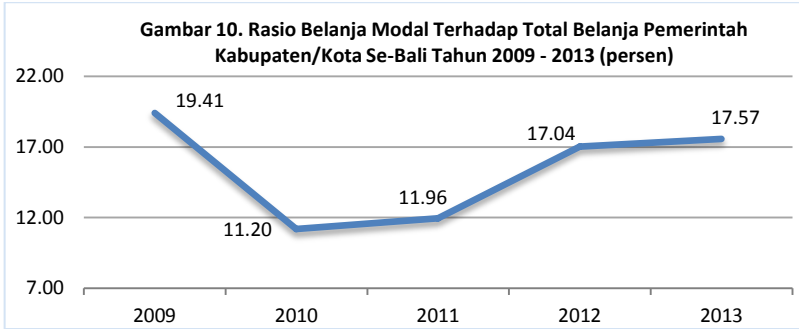


Dalam lima tahun terakhir, Kabupaten Badung menjadi satu-satunya kabupaten di Bali dengan rata-rata rasio belanja pegawai terhadap total belanja dibawah 50 persen yaitu sebesar 39,48 persen (gambar 9). Sementara itu, kabupaten lainnya masih memiliki rasio belanja pegawai terhadap total belanja diatas 50 persen. Secara rata-rata rasio belanja pegawai terhadap total belanja tertinggi dalam periode 2009 – 2013 tercatat di Kabupaten Buleleng yaitu sebesar 65,07 persen. Dengan wilayah terluas di Bali, Kabupaten Buleleng memiliki jumlah PNSD khususnya guru terbanyak sehingga membuat sebagian besar alokasi belanja daerah di Kabupaten ini adalah untuk belanja pegawai.

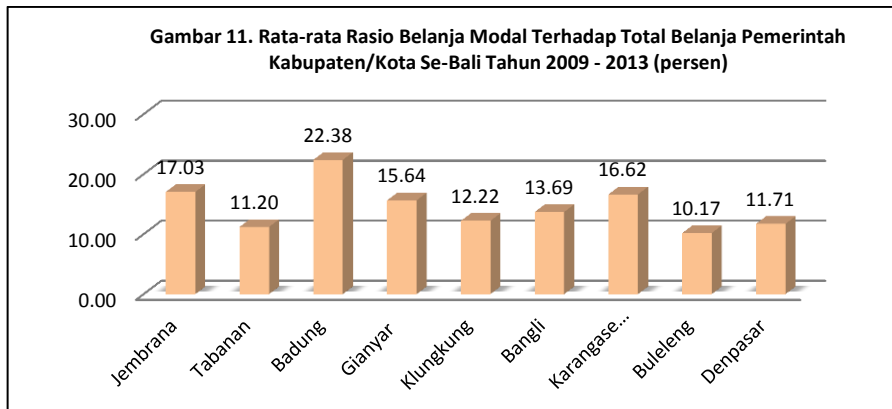


Belanja Modal pemerintah daerah mempunyai peran strategis dalam memicu pertumbuhan ekonomi di daerah bersangkutan. Belanja modal bersifat produktif dan bersentuhan langsung dengan kepentingan publik sehingga dapat menstimulus perekonomian di daerah bersangkutan. Belanja modal merupakan investasi pemerintah daerah yang akan memberikan *multipier effect* bagi masyarakat di daerah tersebut. Misalnya pembangunan infrastruktur, dimana ini akan mendorong investasi di daerah bersangkutan, dan dengan adanya investasi ini ekonomi di daerah tersebut akan berkembang dan menciptakan lapangan kerja baru sehingga akan menyerap pengangguran dan mengurangi jumlah kemiskinan.

Ratio antara belanja modal terhadap total belanja daerah menunjukkan proporsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja modal. Semakin tinggi nilai rasionya maka semakin tinggi pula diharapkan dampaknya terhadap perkembangan perekonomian di daerah tersebut. Selama periode 2009 - 2013 rasio belanja modal terhadap total belanja pemerintah kabupaten/kota se-Bali menunjukkan fluktuasi yang cukup tinggi dimana setelah mengalami penurunan nilai rasio belanja modal pada tahun 2010, sepanjang tahun 2011 - 2013 rasio belanja modal terlihat mengalami kenaikan (gambar 10). Namun demikian, rasio belanja modal terhadap total belanja dalam lima tahun terakhir masih relatif kecil yaitu dibawah 20 persen.



Rata - rata rasio belanja modal terhadap total belanja pemerintah kabupaten/kota se-Bali tahun 2009 - 2013 dapat dilihat pada gambar 11. Kabupaten Badung memiliki rasio belanja modal terhadap total belanja tertinggi yaitu 22,38 persen. Tingginya pendapatan daerah di Kabupaten Badung menyebabkan pemerintah daerah mampu mengalokasikan anggarannya untuk belanja modal lebih besar. Hal ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung yang relative lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Bali dalam lima tahun terakhir. Sementara itu, rata-rata rasio belanja modal terhadap total belanja terendah tercatat di Kabupaten Buleleng yaitu sebesar 11,17 persen. Hal ini sejalan dengan analisis sebelumnya dimana rasio belanja pegawai terhadap total belanja di Kabupaten Buleleng cukup tinggi sehingga menyebabkan rendahnya alokasi belanja daerah untuk belanja modal.



LAMPIRAN

<http://bali.dps.go.id>

Tabel 1 (berlanjut...)
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jembrana Tahun 2009 - 2013
(ribu rupiah)

Rincian	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A PENDAPATAN DAERAH	439 011 922	428 735 342	559 656 551	608 724 425	693 772 159
1 PENDAPATAN ASLI DAERAH	20 715 928	22 068 717	36 247 620	51 066 992	54 775 109
1.1 Hasil Pajak Daerah	4 739 533	4 951 713	9 047 420	9 802 025	18 512 225
1.2 Hasil Retribusi Daerah	6 889 233	8 516 801	5 204 861	7 409 973	8 306 800
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2 000 000	2 039 753	2 602 469	2 602 469	2 850 000
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	7 087 162	6 560 450	19 392 870	31 252 525	25 106 084
2 DANA PERIMBANGAN	376 991 561	362 286 752	395 555 985	457 498 291	511 597 003
2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	18 731 740	18 998 920	20 565 602	20 565 602	15 274 007
2.2 Dana Alokasi Umum (DAU)	306 361 821	308 567 032	336 501 986	396 762 339	450 919 726
2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)	51 898 000	34 720 800	35 488 400	40 170 350	45 403 270
3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	41 304 433	44 379 873	127 352 943	100 159 142	127 400 047
3.1 Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0
3.2 Dana Darurat	0	0	0	0	0
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	27 807 760	32 037 529	62 799 208	63 982 477	72 868 021
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0	0	63 266 895	33 178 975	51 680 144
3.5 Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	13 496 673	12 342 344	1 786 840	2 997 690	2 851 882
3.6 Lain-lain Pendapatan yang Sah	0	0	0	0	0
B BELANJA DAERAH	472 644 608	469 377 456	615 427 631	640 724 425	720 054 951
1 BELANJA TIDAK LANGSUNG	297 046 997	318 965 771	383 875 593	395 301 047	439 268 856
1.1 Belanja Pegawai	233 957 839	253 891 687	328 619 695	337 794 009	377 721 422
1.2 Belanja Bunga	327 540	0	0	0	0
1.3 Belanja Subsidi	2 318 099	1 131 604	0	0	0
1.4 Belanja Hibah	21 482 980	25 515 000	14 248 996	19 696 500	12 410 654
1.5 Belanja Bantuan Sosial	15 955 175	18 453 780	17 484 405	60 000	3 410 000
1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	324 639	494 638	5 039 984	6 602 485	7 843 127
1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	20 680 725	17 448 005	17 982 513	30 648 053	37 383 653
1.8 Belanja Tidak Terduga	2 000 000	2 031 057	500 000	500 000	500 000
2 BELANJA LANGSUNG	175 597 611	150 411 685	231 552 038	245 423 378	280 786 095
2.1 Belanja Pegawai	6 726 941	4 700 046	8 606 141	29 465 624	35 019 951
2.2 Belanja Barang dan Jasa	78 750 887	81 416 500	126 590 883	109 892 570	119 885 953
2.3 Belanja Modal	90 119 783	64 295 139	96 355 014	106 065 184	125 880 190

(berlanjut...)

Tabel 1 (lanjutan...)
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jembrana Tahun 2009 - 2013
(ribu rupiah)

Rincian	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
C PEMBIAYAAN	33 632 686	40 642 114	55 771 080	32 000 000	26 282 791
1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	38 132 686	45 142 114	62 099 080	38 097 000	35 679 791
1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	33 632 686	40 642 114	55 871 080	32 100 000	29 482 791
1.2 Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0
1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0	0	0	0
1.6 Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	0
1.7 Lainnya	4 500 000	4 500 000	6 228 000	5 997 000	6 197 000
2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	4 500 000	4 500 000	6 328 000	6 097 000	9 397 000
2.1 Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0	0	100 000	0	3 200 000
2.3 Pembayaran Pokok Utang	0	0	0	0	0
2.4 Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	997 000
2.5 Lainnya	4 500 000	4 500 000	6 228 000	6 097 000	5 200 000
D SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0	0	0	0	0

Tabel 2 (berlanjut...)
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tabanan Tahun 2009 - 2013
(ribu rupiah)

Rincian	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A PENDAPATAN DAERAH	612 359 657	655 009 004	760 393 395	956 531 601	1 110 810 797
1 PENDAPATAN ASLI DAERAH	49 647 837	93 685 430	110 177 833	137 107 830	182 799 113
1.1 Hasil Pajak Daerah	18 609 170	20 859 170	21 912 170	28 724 089	57 208 398
1.2 Hasil Retribusi Daerah	13 084 293	16 449 721	18 626 998	21 977 882	28 714 329
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3 688 172	4 236 293	4 788 026	5 404 980	5 925 321
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	14 266 202	52 140 246	64 850 639	81 000 879	90 951 065
2 DANA PERIMBANGAN	503 931 720	507 734 697	532 991 485	652 220 986	730 087 497
2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	23 256 210	30 172 545	28 172 842	30 508 202	18 009 432
2.2 Dana Alokasi Umum (DAU)	424 287 510	429 919 452	463 294 443	574 346 244	663 156 595
2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)	56 388 000	47 642 700	41 524 200	47 366 540	48 921 470
3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	58 780 100	53 588 877	117 224 077	167 202 785	197 924 187
3.1 Pendapatan Hibah	9 718 508	0	0	0	0
3.2 Dana Darurat	0	0	0	0	0
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	31 270 079	49 749 057	58 263 120	79 592 933	90 789 282
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0	0	50 765 899	81 732 532	98 586 909
3.5 Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	17 791 513	3 839 820	8 195 058	5 877 320	8 547 996
3.6 Lain-lain Pendapatan yang Sah	0	0	0	0	0
B BELANJA DAERAH	650 317 547	696 921 319	817 012 819	996 251 601	1 142 530 797
1 BELANJA TIDAK LANGSUNG	483 375 769	570 555 970	620 322 248	696 077 112	780 426 324
1.1 Belanja Pegawai	384 712 876	448 468 506	533 802 709	612 796 418	681 735 119
1.2 Belanja Bunga	393 922	687 500	200 000	100 000	100 000
1.3 Belanja Subsidi	0	0	0	0	0
1.4 Belanja Hibah	52 241 400	59 270 780	22 920 050	21 250 300	24 453 000
1.5 Belanja Bantuan Sosial	7 028 800	9 900 000	7 522 500	0	6 000 000
1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1 337 544	1 940 082	2 350 641	3 327 289	6 099 798
1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	36 661 227	49 725 202	52 621 303	56 880 349	59 637 765
1.8 Belanja Tidak Terduga	1 000 000	563 900	905 045	1 722 756	2 400 643
2 BELANJA LANGSUNG	166 941 778	126 365 349	196 690 571	300 174 489	362 104 473
2.1 Belanja Pegawai	19 678 649	15 239 862	7 458 074	13 018 909	14 428 268
2.2 Belanja Barang dan Jasa	71 831 469	81 102 661	113 671 707	152 055 072	223 003 943
2.3 Belanja Modal	75 431 660	30 022 826	75 560 790	135 100 508	124 672 262

(berlanjut...)

Tabel 2 (lanjutan...)
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tabanan Tahun 2009 - 2013
(ribu rupiah)

Rincian	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
C PEMBIAYAAN	37 957 890	41 912 315	56 619 424	39 720 000	31 720 000
1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	38 037 890	48 492 315	57 099 424	42 000 000	37 000 000
1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	38 037 890	48 492 315	57 099 424	42 000 000	37 000 000
1.2 Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0
1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0	0	0	0
1.6 Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	0
1.7 Lainnya	0	0	0	0	0
2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	80 000	6 580 000	480 000	2 280 000	5 280 000
2.1 Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0	0	400 000	2 200 000	5 200 000
2.3 Pembayaran Pokok Utang	80 000	6 580 000	80 000	80 000	80 000
2.4 Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
2.5 Lainnya	0	0	0	0	0
D SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0	0	0	0	0

Tabel 3 (berlanjut...)
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Badung Tahun 2009 - 2013
(ribu rupiah)

Rincian	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A PENDAPATAN DAERAH	1 123 090 913	1 189 367 305	1 295 730 903	1 935 433 575	2 494 697 356
1 PENDAPATAN ASLI DAERAH	667 558 833	858 108 300	925 476 021	1 320 910 478	1 874 766 393
1.1 Hasil Pajak Daerah	618 213 364	799 860 192	862 669 037	1 207 320 000	1 726 810 360
1.2 Hasil Retribusi Daerah	15 252 804	17 465 696	13 480 824	37 842 067	64 555 270
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	17 358 503	20 419 333	30 945 535	34 623 740	43 590 838
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	16 734 162	20 363 079	18 380 625	41 124 671	39 809 925
2 DANA PERIMBANGAN	421 624 663	270 671 582	326 586 546	442 315 671	404 924 830
2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	98 986 743	135 135 914	169 369 401	87 409 445	31 738 647
2.2 Dana Alokasi Umum (DAU)	280 989 920	131 919 568	156 326 247	353 067 906	372 625 383
2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)	41 648 000	3 616 100	290 900	1 838 320	560 800
3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	33 907 417	60 587 423	43 668 334	172 207 426	215 006 133
3.1 Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0
3.2 Dana Darurat	0	0	0	0	0
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	29 875 437	34 531 908	41 653 294	98 259 035	106 705 857
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0	0	0	46 475 298	76 432 769
3.5 Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	4 031 980	1 865 040	2 015 040	4 188 540	2 909 325
3.6 Lain-lain Pendapatan yang Sah	0	24 190 475	0	23 284 553	28 958 182
B BELANJA DAERAH	1 489 933 205	1 323 217 378	1 502 159 418	2 051 315 790	2 859 793 967
1 BELANJA TIDAK LANGSUNG	803 084 894	967 135 768	1 079 650 066	1 230 344 838	1 464 760 252
1.1 Belanja Pegawai	574 770 517	628 102 765	737 469 831	821 435 762	928 622 880
1.2 Belanja Bunga	16 171 875	4 192 708	0	0	0
1.3 Belanja Subsidi	330 375	330 375	840 000	660 000	2 090 000
1.4 Belanja Hibah	33 740 935	55 341 719	51 021 580	42 922 220	63 545 583
1.5 Belanja Bantuan Sosial	8 736 626	20 533 357	20 933 040	39 863 343	55 001 742
1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	73 255 456	95 246 183	104 551 926	133 257 151	195 922 510
1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	93 079 110	160 388 661	161 833 689	189 206 362	216 577 537
1.8 Belanja Tidak Terduga	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
2 BELANJA LANGSUNG	686 848 311	356 081 610	422 509 352	820 970 952	1 395 033 715
2.1 Belanja Pegawai	42 509 669	40 485 684	32 899 530	55 540 066	74 320 572
2.2 Belanja Barang dan Jasa	170 717 336	188 219 620	215 817 227	325 505 307	428 038 244
2.3 Belanja Modal	473 621 306	127 376 306	173 792 595	439 925 579	892 674 899

(berlanjut...)

Tabel 3 (lanjutan...)
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Badung Tahun 2009 - 2013
(ribu rupiah)

Rincian	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
C PEMBIAYAAN	372 424 213	133 869 246	207 161 174	115 882 215	365 096 611
1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	498 099 213	260 918 446	215 608 574	261 082 215	479 096 611
1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	219 599 213	232 418 446	215 608 574	261 082 215	479 096 611
1.2 Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0
1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah	250 000 000	0	0	0	0
1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0	0	0	0
1.6 Penerimaan Piutang Daerah	28 500 000	28 500 000	0	0	0
1.7 Lainnya	0	0	0	0	0
2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	125 675 000	127 049 200	8 447 400	145 200 000	114 000 000
2.1 Pembentukan Dana Cadangan	675 000	0	0	0	0
2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	125 000 000	2 049 200	6 500 000	145 200 000	114 000 000
2.3 Pembayaran Pokok Utang	0	125 000 000	0	0	0
2.4 Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
2.5 Lainnya	0	0	1 947 400	0	0
D SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	5 581 921	19 173	732 659	0	0

Tabel 4 (berlanjut...)
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gianyar Tahun 2009 - 2013
(ribu rupiah)

Rincian	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A PENDAPATAN DAERAH	652 453 018	665 806 701	807 983 991	974 869 151	1 112 299 413
1 PENDAPATAN ASLI DAERAH	86 533 558	127 824 774	149 348 894	210 192 685	238 558 925
1.1 Hasil Pajak Daerah	45 301 723	74 209 228	86 272 299	143 247 723	156 458 723
1.2 Hasil Retribusi Daerah	14 526 272	21 249 171	28 818 182	27 727 106	27 546 296
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3 100 000	3 764 731	5 339 119	5 339 119	5 339 119
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	23 605 563	28 601 644	28 919 294	33 878 737	49 214 788
2 DANA PERIMBANGAN	476 757 750	452 895 057	509 368 719	592 077 460	683 872 430
2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	23 538 780	21 639 171	33 188 501	23 264 259	29 420 424
2.2 Dana Alokasi Umum (DAU)	393 604 970	387 493 486	435 103 915	532 883 001	609 293 266
2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)	59 614 000	43 762 400	41 076 300	35 930 200	45 158 740
3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	89 161 710	85 086 870	149 263 378	172 599 006	189 868 058
3.1 Pendapatan Hibah	700 000	5 302 175	1 726 420	0	0
3.2 Dana Darurat	0	9 900 620	0	0	0
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	28 514 067	32 776 444	40 588 482	64 142 479	69 626 817
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	54 152 228	34 507 891	103 361 536	105 233 087	116 634 566
3.5 Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	5 795 415	2 599 740	3 589 940	3 223 440	3 606 676
3.6 Lain-lain Pendapatan yang Sah	0	0	0	0	0
B BELANJA DAERAH	720 199 834	666 231 207	862 983 527	1 006 519 359	1 156 799 413
1 BELANJA TIDAK LANGSUNG	456 205 197	470 628 219	600 111 627	698 038 290	765 204 605
1.1 Belanja Pegawai	396 608 619	407 894 052	518 430 578	608 763 139	670 620 250
1.2 Belanja Bunga	3 058 120	4 712 633	1 074 200	75 050	0
1.3 Belanja Subsidi	1 020 000	999 960	2 818 320	2 818 320	2 872 920
1.4 Belanja Hibah	13 516 188	10 152 582	17 580 987	29 363 582	25 053 300
1.5 Belanja Bantuan Sosial	6 655 000	6 199 532	14 513 900	0	8 475 000
1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	2 576 617	17 242 740	21 587 446	25 332 668	25 612 785
1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	31 770 653	22 026 720	23 806 196	31 385 531	34 270 350
1.8 Belanja Tidak Terduga	1 000 000	1 400 000	300 000	300 000	300 000
2 BELANJA LANGSUNG	263 994 637	195 602 988	262 871 900	308 481 069	391 594 808
2.1 Belanja Pegawai	29 644 411	26 292 537	30 767 753	34 160 350	32 164 235
2.2 Belanja Barang dan Jasa	67 755 221	65 605 424	118 185 757	140 376 213	176 459 357
2.3 Belanja Modal	166 595 005	103 705 027	113 918 390	133 944 506	182 971 217

(berlanjut...)

Tabel 4 (lanjutan...)
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gianyar Tahun 2009 - 2013
(ribu rupiah)

Rincian	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
C PEMBIAYAAN	67 746 816	424 506	54 999 536	32 349 792	44 500 000
1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	76 092 302	7 769 992	64 836 178	35 349 792	50 000 000
1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	76 092 302	7 769 992	64 836 178	35 000 000	50 000 000
1.2 Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0
1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	349 792	0
1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0	0	0	0
1.6 Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	0
1.7 Lainnya	0	0	0	0	0
2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	8 345 486	7 345 486	9 836 642	3 000 000	5 500 000
2.1 Pembentukan Dana Cadangan	0	0	9 836 642	0	0
2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2 000 000	1 000 000	0	3 000 000	5 500 000
2.3 Pembayaran Pokok Utang	6 345 486	6 345 486	0	0	0
2.4 Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
2.5 Lainnya	0	0	0	0	0
D SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0	0	0	699 584	0

Tabel 5 (berlanjut...)
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klungkung Tahun 2009 - 2013
(ribu rupiah)

Rincian	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A PENDAPATAN DAERAH	415 519 848	401 931 331	454 717 384	554 900 431	613 644 989
1 PENDAPATAN ASLI DAERAH	23 695 468	28 833 783	32 159 730	35 603 693	48 541 694
1.1 Hasil Pajak Daerah	1 592 545	3 541 700	4 111 496	871 733	7 020 496
1.2 Hasil Retribusi Daerah	16 264 654	18 884 069	20 094 126	0	12 575 127
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2 896 716	3 306 780	4 230 395	5 228 434	5 963 550
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	2 941 553	3 101 234	3 723 713	29 503 526	22 982 522
2 DANA PERIMBANGAN	349 855 134	335 859 136	366 637 386	440 155 874	507 661 415
2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	20 086 107	20 697 841	16 937 130	19 720 621	19 775 716
2.2 Dana Alokasi Umum (DAU)	278 553 027	285 662 095	319 814 056	387 340 103	444 174 019
2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)	51 216 000	29 499 200	29 886 200	33 095 150	43 711 680
3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	41 969 246	37 238 412	55 920 268	79 140 864	57 411 879
3.1 Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0
3.2 Dana Darurat	0	0	0	0	0
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	31 719 251	35 634 326	41 959 100	47 949 281	55 231 304
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0	0	12 273 908	29 288 473	0
3.5 Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	10 249 995	1 554 086	1 687 260	1 903 110	2 210 575
3.6 Lain-lain Pendapatan yang Sah	0	0	0	0	0
B BELANJA DAERAH	476 023 839	453 759 001	511 670 994	590 253 930	647 135 362
1 BELANJA TIDAK LANGSUNG	288 646 092	336 870 516	340 574 693	398 949 275	433 248 609
1.1 Belanja Pegawai	254 285 373	282 720 545	305 335 823	368 382 599	357 658 272
1.2 Belanja Bunga	0	0	0	0	0
1.3 Belanja Subsidi	0	0	0	0	0
1.4 Belanja Hibah	8 146 000	24 418 305	8 151 735	4 703 735	46 543 176
1.5 Belanja Bantuan Sosial	11 519 358	12 499 858	9 330 882	7 569 840	551 000
1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	520 412	575 681	824 131	844 481	2 519 352
1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	13 174 949	16 156 127	16 178 622	16 448 620	24 976 809
1.8 Belanja Tidak Terduga	1 000 000	500 000	753 500	1 000 000	1 000 000
2 BELANJA LANGSUNG	187 377 747	116 888 485	171 096 301	191 304 655	213 886 753
2.1 Belanja Pegawai	11 837 890	7 707 210	10 896 511	9 779 060	17 420 901
2.2 Belanja Barang dan Jasa	89 353 547	68 644 384	77 395 727	87 121 555	113 569 926
2.3 Belanja Modal	86 186 310	40 536 891	82 804 063	94 404 040	82 895 927

(berlanjut...)

Tabel 5 (lanjutan...)
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klungkung Tahun 2009 - 2013
(ribu rupiah)

Rincian	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
C PEMBIAYAAN	60 503 991	51 827 670	56 953 610	35 353 499	33 490 374
1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	62 031 347	51 827 670	57 303 610	37 703 499	38 740 374
1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	62 031 347	51 827 670	57 078 610	37 535 374	37 535 374
1.2 Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0
1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0	0	168 125	0
1.6 Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	0
1.7 Lainnya	0	0	225 000	0	1 205 000
2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	1 527 356	0	350 000	2 350 000	5 250 000
2.1 Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1 527 356	0	350 000	2 350 000	5 250 000
2.3 Pembayaran Pokok Utang	0	0	0	0	0
2.4 Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
2.5 Lainnya	0	0	0	0	0
D SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0	0	0	0	0

Tabel 6 (berlanjut...)
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangli Tahun 2009 - 2013
(ribu rupiah)

Rincian	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A PENDAPATAN DAERAH	407 180 259	429 197 688	519 595 092	567 249 437	653 197 481
1 PENDAPATAN ASLI DAERAH	15 178 848	17 000 000	21 200 000	31 000 000	42 000 000
1.1 Hasil Pajak Daerah	2 510 577	2 530 112	3 473 352	5 793 609	7 101 021
1.2 Hasil Retribusi Daerah	9 132 136	10 866 413	11 495 766	12 486 918	12 623 598
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1 359 661	1 490 000	2 419 629	2 500 000	2 500 000
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	2 176 474	2 113 475	3 811 253	10 219 473	19 775 381
2 DANA PERIMBANGAN	343 350 619	344 791 989	370 023 272	453 987 421	511 399 438
2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	21 738 899	22 659 513	19 092 601	18 785 258	18 883 194
2.2 Dana Alokasi Umum (DAU)	276 000 720	292 695 476	321 578 191	396 942 913	450 812 694
2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)	45 611 000	29 437 000	29 352 400	38 259 250	41 703 550
3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	48 650 792	67 405 699	128 371 820	82 262 016	99 798 044
3.1 Pendapatan Hibah	0	24 655 535	0	0	0
3.2 Dana Darurat	4 000 000	0	0	0	0
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	25 943 947	40 931 574	48 376 480	49 137 935	56 790 913
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0	0	74 717 200	27 452 881	39 289 956
3.5 Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	18 706 845	1 758 540	5 278 140	5 671 200	3 717 175
3.6 Lain-lain Pendapatan yang Sah	0	0	0	0	0
B BELANJA DAERAH	456 737 259	472 197 688	567 441 778	596 749 437	688 479 409
1 BELANJA TIDAK LANGSUNG	310 674 013	358 290 057	365 507 113	404 853 803	509 620 090
1.1 Belanja Pegawai	249 841 236	278 673 130	315 438 008	354 484 440	411 795 654
1.2 Belanja Bunga	0	0	0	0	0
1.3 Belanja Subsidi	165 000	165 000	165 000	165 000	1 165 000
1.4 Belanja Hibah	4 899 000	32 098 795	6 349 445	8 014 350	20 350 419
1.5 Belanja Bantuan Sosial	28 628 106	17 451 793	6 310 500	767 900	5 036 450
1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0	0	1 576 912	1 828 053	1 972 462
1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	25 140 671	26 601 339	34 533 856	38 340 310	68 300 105
1.8 Belanja Tidak Terduga	2 000 000	3 300 000	1 133 392	1 253 750	1 000 000
2 BELANJA LANGSUNG	146 063 246	113 907 631	201 934 665	191 895 634	178 859 319
2.1 Belanja Pegawai	22 075 177	16 671 149	18 486 355	18 608 572	21 339 245
2.2 Belanja Barang dan Jasa	72 175 287	46 297 608	73 279 156	89 481 279	102 237 917
2.3 Belanja Modal	51 812 782	50 938 874	110 169 154	83 805 783	55 282 157

(berlanjut...)

Tabel 6 (lanjutan...)
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangli Tahun 2009 - 2013
(ribu rupiah)

Rincian	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
C PEMBIAYAAN	49 557 000	43 000 000	47 846 686	29 500 000	35 281 928
1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	49 557 000	43 000 000	49 846 686	30 000 000	35 281 928
1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	49 557 000	43 000 000	49 362 426	30 000 000	35 281 928
1.2 Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0
1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0	0	0	0
1.6 Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	0
1.7 Lainnya	0	0	484 260	0	0
2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	0	0	2 000 000	500 000	0
2.1 Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0	0	2 000 000	500 000	0
2.3 Pembayaran Pokok Utang	0	0	0	0	0
2.4 Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
2.5	0	0	0	0	0
D SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0	0	0	0	0

Tabel 7 (berlanjut...)

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karangasem Tahun 2009 - 2013
(ribu rupiah)

Rincian	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A PENDAPATAN DAERAH	573 931 085	585 912 005	667 049 700	837 759 326	957 295 413
1 PENDAPATAN ASLI DAERAH	37 500 000	47 808 904	54 830 543	124 305 930	140 991 228
1.1 Hasil Pajak Daerah	19 406 500	27 309 704	28 692 000	77 627 801	86 292 000
1.2 Hasil Retribusi Daerah	7 180 984	10 301 700	5 657 000	7 247 980	9 050 205
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6 000 000	7 000 000	8 000 000	11 097 108	12 250 300
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	4 912 516	3 197 500	12 481 543	28 333 041	33 398 723
2 DANA PERIMBANGAN	432 937 513	456 964 919	473 984 295	576 383 961	642 839 138
2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	19 548 030	26 093 055	22 211 856	26 590 371	26 647 713
2.2 Dana Alokasi Umum (DAU)	356 681 483	374 537 064	410 037 739	503 028 930	563 981 785
2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)	56 708 000	56 334 800	41 734 700	46 764 660	51 209 640
3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	103 493 572	81 138 182	138 234 862	137 069 435	174 465 047
3.1 Pendapatan Hibah	0	0	180 000	420 000	420 000
3.2 Dana Darurat	0	0	0	0	0
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	31 084 974	36 164 425	44 562 942	55 313 093	60 209 968
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	59 152 228	24 655 885	72 961 948	54 485 573	79 110 834
3.5 Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	13 256 370	20 317 872	20 529 972	26 840 769	34 724 245
3.6 Lain-lain Pendapatan yang Sah	0	0	0	10 000	0
B BELANJA DAERAH	669 262 534	628 626 366	722 528 555	984 323 383	1 049 658 680
1 BELANJA TIDAK LANGSUNG	371 171 943	459 166 839	515 968 190	603 562 760	681 484 820
1.1 Belanja Pegawai	316 442 354	387 554 366	449 082 131	522 732 626	581 596 339
1.2 Belanja Bunga	177 500	165 000	165 000	1 165 000	8 165 000
1.3 Belanja Subsidi	0	282 189	0	0	0
1.4 Belanja Hibah	5 298 270	20 941 070	10 854 544	29 627 784	27 187 500
1.5 Belanja Bantuan Sosial	20 390 990	14 748 000	17 997 000	195 000	2 955 000
1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	5 531 142	6 734 470	5 736 450	11 386 770	13 154 302
1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	21 831 687	27 241 744	30 633 065	35 755 580	45 226 679
1.8 Belanja Tidak Terduga	1 500 000	1 500 000	1 500 000	2 700 000	3 200 000
2 BELANJA LANGSUNG	298 090 591	169 459 527	206 560 365	380 760 623	368 173 860
2.1 Belanja Pegawai	26 962 766	6 990 913	13 283 238	14 377 493	19 921 986
2.2 Belanja Barang dan Jasa	104 914 195	68 597 651	99 709 269	138 501 985	173 168 855
2.3 Belanja Modal	166 213 630	93 870 963	93 567 858	227 881 145	175 083 019

(berlanjut...)

Tabel 7 (lanjutan...)
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karangasem Tahun 2009 - 2013
(ribu rupiah)

Rincian	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
C PEMBIAYAAN	95 331 449	42 714 361	55 478 855	146 564 057	92 363 267
1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	99 345 449	52 271 990	61 672 042	151 525 018	111 863 267
1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	99 345 449	52 271 990	56 134 838	48 167 685	46 045 844
1.2 Pencairan Dana Cadangan	0	0	5 537 204	5 357 333	0
1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0
1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	98 000 000	65 817 423
1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0	0	0	0
1.6 Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	0
1.7 Lainnya	0	0	0	0	0
2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	4 014 000	9 557 629	6 193 187	4 960 961	19 500 000
2.1 Pembentukan Dana Cadangan	0	0	4 255 733	312 979	0
2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1 014 000	1 000 000	1 000 000	3 847 108	5 000 000
2.3 Pembayaran Pokok Utang	3 000 000	8 557 629	937 454	800 874	14 500 000
2.4 Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
2.5 Lainnya	0	0	0	0	0
D SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0	0	0	0	0

Tabel 8 (berlanjut...)
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buleleng Tahun 2009 - 2013
(ribu rupiah)

Rincian	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A PENDAPATAN DAERAH	742 204 715	750 192 515	948 490 948	1 118 371 415	1 286 766 285
1 PENDAPATAN ASLI DAERAH	57 247 000	69 626 551	85 600 000	111 569 018	128 000 000
1.1 Hasil Pajak Daerah	15 150 530	16 492 225	20 560 000	36 127 887	40 958 425
1.2 Hasil Retribusi Daerah	32 141 938	5 694 876	8 804 246	8 218 192	12 131 756
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5 929 300	5 969 800	6 912 260	9 156 368	9 734 199
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	4 025 232	41 469 650	49 323 494	58 066 571	65 175 620
2 DANA PERIMBANGAN	593 618 559	615 375 637	664 288 485	794 743 794	906 226 901
2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	37 094 758	36 859 223	41 153 478	44 456 898	42 495 661
2.2 Dana Alokasi Umum (DAU)	506 292 801	512 748 214	568 406 307	687 697 696	796 419 220
2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)	50 231 000	65 768 200	54 728 700	62 589 200	67 312 020
3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	91 339 156	65 190 327	196 602 463	212 058 603	252 539 384
3.1 Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0
3.2 Dana Darurat	0	0	0	0	0
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	68 015 247	60 869 347	70 522 577	105 691 634	120 747 557
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0	0	119 919 536	87 624 978	126 009 808
3.5 Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	21 582 739	3 536 980	7 392 180	17 989 992	5 782 018
3.6 Lain-lain Pendapatan yang Sah	1 741 170	764 000	768 170	751 999	0
B BELANJA DAERAH	799 688 996	794 342 515	1 035 921 929	1 170 579 218	1 401 593 792
1 BELANJA TIDAK LANGSUNG	530 116 784	615 427 135	711 669 460	836 491 898	917 199 812
1.1 Belanja Pegawai	471 131 599	512 396 287	630 866 703	715 422 526	806 791 653
1.2 Belanja Bunga	300 000	200 000	20 000	200 000	60 000
1.3 Belanja Subsidi	0	0	0	0	0
1.4 Belanja Hibah	15 284 700	56 589 675	17 635 361	58 779 700	28 710 000
1.5 Belanja Bantuan Sosial	9 995 700	5 695 000	5 008 000	2 169 822	4 915 000
1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	3 775 119	2 750 000	3 000 000	4 000 000	3 930 093
1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	27 051 091	35 772 200	50 695 497	54 235 500	71 378 445
1.8 Belanja Tidak Terduga	2 578 575	2 023 973	4 443 899	1 684 350	1 414 711
2 BELANJA LANGSUNG	269 572 212	178 915 380	324 252 469	334 087 320	484 393 980
2.1 Belanja Pegawai	22 915 193	19 321 600	23 969 852	18 572 949	28 913 324
2.2 Belanja Barang dan Jasa	135 576 642	116 087 442	168 547 688	186 983 825	254 209 425
2.3 Belanja Modal	111 080 377	43 506 338	131 734 929	128 530 546	201 271 232

(berlanjut...)

Tabel 8 (lanjutan...)
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buleleng Tahun 2009 - 2013
(ribu rupiah)

Rincian	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
C PEMBIAYAAN	57 484 281	44 150 000	87 430 981	52 207 803	114 827 507
1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	59 534 281	47 000 000	90 380 981	55 157 803	120 377 507
1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	59 534 281	47 000 000	90 380 981	55 157 803	120 377 507
1.2 Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0
1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0	0	0	0
1.6 Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	0
1.7 Lainnya	0	0	0	0	0
2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	2 050 000	2 850 000	2 950 000	2 950 000	5 550 000
2.1 Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1 700 000	2 500 000	2 600 000	2 600 000	5 250 000
2.3 Pembayaran Pokok Utang	350 000	350 000	350 000	350 000	300 000
2.4 Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
2.5 Lainnya	0	0	0	0	0
D SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0	0	0	0	0

Tabel 9 (berlanjut...)
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Denpasar Tahun 2009 - 2013
(ribu rupiah)

Rincian	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A PENDAPATAN DAERAH	677 310 237	831 162 352	937 935 244	1 149 331 960	1 278 760 313
1 PENDAPATAN ASLI DAERAH	156 036 195	213 005 123	232 807 632	352 511 291	513 061 591
1.1 Hasil Pajak Daerah	105 250 000	145 400 000	161 500 000	267 800 000	403 000 000
1.2 Hasil Retribusi Daerah	18 936 747	20 833 458	21 164 750	23 533 750	38 079 489
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4 893 318	7 554 985	7 177 592	13 455 541	15 325 102
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	26 956 130	39 216 680	42 965 290	47 722 000	56 657 000
2 DANA PERIMBANGAN	468 053 666	471 603 138	530 920 924	614 150 405	656 582 041
2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	73 118 806	121 041 986	145 825 996	92 994 609	64 982 449
2.2 Dana Alokasi Umum (DAU)	360 016 860	336 125 552	381 538 038	512 666 446	580 807 702
2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)	34 918 000	14 435 600	3 556 900	8 489 350	10 791 890
3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	53 220 376	146 554 091	174 206 688	182 670 264	109 116 680
3.1 Pendapatan Hibah	0	35 126 635	111 159 367	4 688 512	1 688 512
3.2 Dana Darurat	0	0	0	0	0
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	42 919 847	59 304 220	61 782 621	92 575 449	100 529 183
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0	50 900 536	0	83 956 353	0
3.5 Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	9 430 309	1 222 700	1 264 700	1 449 950	6 898 985
3.6 Lain-lain Pendapatan yang Sah	870 130	0	0	0	0
B BELANJA DAERAH	677 310 237	1 022 090 860	1 027 835 244	1 218 291 878	1 353 987 823
1 BELANJA TIDAK LANGSUNG	393 041 938	642 211 842	714 333 258	672 616 325	661 132 515
1.1 Belanja Pegawai	351 310 092	540 123 043	578 415 527	589 379 525	579 045 203
1.2 Belanja Bunga	0	0	0	0	0
1.3 Belanja Subsidi	0	350 000	0	0	0
1.4 Belanja Hibah	8 166 062	26 172 446	61 520 675	16 961 682	26 665 000
1.5 Belanja Bantuan Sosial	11 307 034	24 013 940	11 493 500	0	162 500
1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	6 863 750	10 986 253	39 582 723	19 187 618	19 187 618
1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	13 395 000	38 565 271	22 096 696	45 037 500	35 072 194
1.8 Belanja Tidak Terduga	2 000 000	2 000 889	1 224 137	2 050 000	1 000 000
2 BELANJA LANGSUNG	284 268 299	379 879 018	313 501 986	545 675 553	692 855 308
2.1 Belanja Pegawai	31 106 615	31 042 503	27 788 854	49 495 005	54 688 927
2.2 Belanja Barang dan Jasa	178 141 920	265 646 488	226 288 037	278 492 925	388 529 059
2.3 Belanja Modal	75 019 764	83 190 027	59 425 095	217 687 623	249 637 322

(berlanjut...)

Tabel 9 (lanjutan...)
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Denpasar Tahun 2009 - 2013
(ribu rupiah)

Rincian	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
C PEMBIAYAAN	0	190 928 508	89 900 000	68 959 918	75 227 510
1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	0	191 928 508	90 000 000	71 930 674	89 979 713
1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	0	191 928 508	90 000 000	71 930 674	89 979 713
1.2 Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0
1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0	0	0	0
1.6 Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	0
1.7 Lainnya	0	0	0	0	0
2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	0	1 000 000	100 000	2 970 756	14 752 203
2.1 Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0	1 000 000	100 000	2 970 756	14 752 203
2.3 Pembayaran Pokok Utang	0	0	0	0	0
2.4 Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
2.5 Lainnya	0	0	0	0	0
D SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0	0	0	0	0

Tabel 10 (berlanjut...)

Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jembrana Tahun 2009 - 2013
(ribu rupiah)

Rincian	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A PENDAPATAN DAERAH	477 515 492	488 984 315	568 261 335	651 398 304	745 334 983
1 PENDAPATAN ASLI DAERAH	33 952 879	34 380 823	41 330 606	46 470 110	68 485 482
1.1 Hasil Pajak Daerah	4 384 491	5 294 407	9 000 787	11 043 396	22 069 530
1.2 Hasil Retribusi Daerah	16 882 015	8 129 803	4 521 870	6 750 578	7 905 026
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2 039 753	2 305 410	2 602 469	2 853 011	3 937 071
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	10 646 620	18 651 203	25 205 480	25 823 127	34 573 855
2 DANA PERIMBANGAN	384 853 878	371 898 146	396 658 413	464 324 549	517 834 703
2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	26 594 057	28 610 314	21 668 027	27 391 860	21 511 707
2.2 Dana Alokasi Umum (DAU)	306 361 821	308 567 032	336 501 986	396 762 339	450 919 726
2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)	51 898 000	34 720 800	35 488 400	40 170 350	45 403 270
3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	58 708 735	82 705 346	130 272 316	140 603 644	159 014 797
3.1 Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0
3.2 Dana Darurat	0	0	0	0	0
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	39 857 223	42 318 938	66 498 752	79 964 813	86 699 593
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	6 082 350	28 413 200	61 986 724	51 680 144	70 517 727
3.5 Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	12 769 162	11 973 208	1 786 840	8 958 688	1 797 477
3.6 Lain-lain Pendapatan yang Sah	0	0	0	0	0
B BELANJA DAERAH	479 134 809	496 307 776	546 848 475	664 723 060	718 538 444
1 BELANJA TIDAK LANGSUNG	297 047 883	347 243 048	358 144 524	394 837 894	416 035 004
1.1 Belanja Pegawai	234 236 869	279 827 874	305 653 578	335 950 650	353 148 286
1.2 Belanja Bunga	199 436	0	0	0	0
1.3 Belanja Subsidi	148 810	33 232	0	0	0
1.4 Belanja Hibah	21 306 480	30 361 402	14 192 868	23 593 700	14 529 650
1.5 Belanja Bantuan Sosial	20 003 324	19 357 120	15 236 446	60 000	3 109 038
1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	324 638	16 608 812	5 039 984	7 888 319	8 528 288
1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	19 948 768	590 004	17 790 813	27 259 198	36 700 121
1.8 Belanja Tidak Terduga	879 558	464 604	230 835	86 028	19 622
2 BELANJA LANGSUNG	182 086 926	149 064 728	188 703 951	269 885 166	302 503 439
2.1 Belanja Pegawai	6 608 818	4 285 156	7 688 909	28 006 612	33 198 532
2.2 Belanja Barang dan Jasa	74 811 184	86 616 292	113 521 519	107 264 780	126 741 441
2.3 Belanja Modal	100 666 924	58 163 280	67 493 523	134 613 774	142 563 466

(berlanjut...)

Tabel 10 (lanjutan...)
Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jembrana Tahun 2009 - 2013
(ribu rupiah)

Rincian	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
C PEMBIAYAAN	1 619 317	63 194 541	55 871 080	74 388 745	58 067 447
1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	6 119 317	68 786 891	60 871 080	82 588 745	66 467 447
1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	1 619 317	64 286 891	55 871 080	77 283 939	61 063 989
1.2 Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0
1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0	0	0	0
1.6 Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	0
1.7 Lainnya	4 500 000	4 500 000	5 000 000	5 304 805	5 403 458
2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	4 500 000	5 592 350	5 000 000	8 200 000	8 400 000
2.1 Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0	0	0	3 200 000	3 200 000
2.3 Pembayaran Pokok Utang	0	0	0	0	0
2.4 Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
2.5 Lainnya	4 500 000	5 592 350	5 000 000	5 000 000	5 200 000
D SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0	55 871 080	77 283 940	61 063 989	84 863 986

Tabel 11 (berlanjut...)

Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tabanan Tahun 2009 - 2013
(ribu rupiah)

Rincian	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A PENDAPATAN DAERAH	689 934 994	774 180 534	886 307 834	1 056 319 329	1 253 026 819
1 PENDAPATAN ASLI DAERAH	93 840 479	107 836 349	141 046 017	183 295 007	255 418 219
1.1 Hasil Pajak Daerah	20 897 150	22 186 410	31 009 884	50 214 003	98 701 047
1.2 Hasil Retribusi Daerah	15 143 390	18 626 999	20 524 712	28 540 910	40 393 769
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4 236 293	4 788 026	5 404 979	5 925 320	8 046 089
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	53 563 646	62 234 914	84 106 442	98 614 773	108 277 313
2 DANA PERIMBANGAN	513 030 256	512 583 277	534 404 760	656 500 460	734 577 587
2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	32 360 787	35 021 125	29 814 528	34 787 676	22 499 522
2.2 Dana Alokasi Umum (DAU)	424 281 469	429 919 452	463 073 532	574 346 244	663 156 595
2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)	56 388 000	47 642 700	41 516 700	47 366 540	48 921 470
3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	83 064 259	153 760 908	210 957 057	216 523 861	263 031 013
3.1 Pendapatan Hibah	8 318 006	0	0	0	0
3.2 Dana Darurat	0	0	0	0	0
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	44 824 676	60 254 915	76 643 252	92 041 973	108 713 962
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0	38 686 173	127 082 202	118 390 170	146 900 369
3.5 Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	11 847 975	4 819 820	7 131 603	6 091 718	7 416 682
3.6 Lain-lain Pendapatan yang Sah	18 073 602	0	0	0	0
B BELANJA DAERAH	700 965 894	813 535 390	882 459 134	1 065 536 683	1 198 702 307
1 BELANJA TIDAK LANGSUNG	506 945 650	595 839 696	639 160 268	728 164 337	809 282 889
1.1 Belanja Pegawai	413 544 757	511 941 710	561 091 418	633 357 315	691 380 832
1.2 Belanja Bunga	243 937	687 500	81 413	72 318	62 830
1.3 Belanja Subsidi	0	0	0	0	0
1.4 Belanja Hibah	47 340 282	20 734 011	16 911 048	29 847 290	34 772 500
1.5 Belanja Bantuan Sosial	7 454 028	9 245 200	8 641 808	0	6 000 000
1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1 329 945	1 940 082	2 350 641	3 327 289	6 099 798
1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	35 583 514	50 405 002	48 810 037	59 370 869	67 735 168
1.8 Belanja Tidak Terduga	1 449 187	886 191	1 273 903	2 189 256	3 231 761
2 BELANJA LANGSUNG	194 020 244	217 695 694	243 298 866	337 372 346	389 419 418
2.1 Belanja Pegawai	16 765 623	13 970 763	12 058 728	13 332 878	13 194 053
2.2 Belanja Barang dan Jasa	99 919 809	95 818 941	160 797 526	185 316 398	248 038 980
2.3 Belanja Modal	77 334 812	107 905 990	70 442 612	138 723 070	128 186 385

(berlanjut...)

Tabel 11 (lanjutan...)
Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tabanan Tahun 2009 - 2013
(ribu rupiah)

Rincian	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
C PEMBIAYAAN	56 965 771	39 354 856	50 056 067	52 586 851	38 204 187
1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	57 043 806	45 934 856	50 534 102	53 964 886	43 482 222
1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	50 543 806	45 934 856	50 534 102	53 904 766	43 369 497
1.2 Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0
1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah	6 500 000	0	0	0	0
1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0	0	60 120	112 725
1.6 Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	0
1.7 Lainnya	0	0	0	0	0
2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	78 035	6 580 000	478 035	1 378 035	5 278 035
2.1 Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	1 300 000	0
2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0	0	400 000	0	5 200 000
2.3 Pembayaran Pokok Utang	78 035	6 580 000	78 035	78 035	78 035
2.4 Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
2.5 Lainnya	0	0	0	0	0
D SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	45 934 871	0	53 904 767	43 369 497	92 528 698

Tabel 12 (berlanjut...)
Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Badung Tahun 2009 - 2013
(ribu rupiah)

Rincian	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A PENDAPATAN DAERAH	1 414 806 329	1 425 462 929	1 850 767 401	2 618 695 201	2 954 662 971
1 PENDAPATAN ASLI DAERAH	850 170 021	979 241 565	1 406 298 099	1 870 187 279	2 279 113 502
1.1 Hasil Pajak Daerah	776 040 368	877 353 367	1 281 507 140	1 685 560 837	2 010 554 251
1.2 Hasil Retribusi Daerah	21 554 027	42 468 648	35 830 043	68 946 271	90 457 626
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	19 733 035	29 815 040	35 588 094	41 756 733	71 350 740
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	32 842 591	29 604 510	53 372 822	73 923 438	106 750 885
2 DANA PERIMBANGAN	457 854 449	322 095 763	280 705 583	515 654 159	429 797 446
2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	135 218 648	186 560 095	123 435 032	160 747 933	56 611 263
2.2 Dana Alokasi Umum (DAU)	280 987 801	131 919 568	157 052 376	353 067 906	372 625 383
2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)	41 648 000	3 616 100	218 175	1 838 320	560 800
3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	106 781 859	124 125 601	163 763 719	232 853 762	245 752 022
3.1 Pendapatan Hibah	16 646	0	89 625	0	0
3.2 Dana Darurat	0	0	0	0	0
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	42 684 458	45 183 717	61 903 646	122 552 871	102 342 371
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0	40 637 437	84 655 997	76 432 769	113 491 184
3.5 Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	3 570 500	1 865 040	2 015 040	10 583 570	960 285
3.6 Lain-lain Pendapatan yang Sah	60 510 255	36 439 407	15 099 411	23 284 553	28 958 182
B BELANJA DAERAH	1 429 408 008	1 319 058 351	1 572 210 488	2 334 080 297	2 755 459 722
1 BELANJA TIDAK LANGSUNG	769 329 217	903 208 856	1 059 192 475	1 268 529 843	1 488 224 177
1.1 Belanja Pegawai	477 673 844	565 898 250	657 803 294	767 437 703	881 464 639
1.2 Belanja Bunga	11 091 904	3 621 688	0	0	0
1.3 Belanja Subsidi	330 289	754 883	540 000	910 000	2 090 000
1.4 Belanja Hibah	62 524 713	35 167 765	43 186 759	444 320 461	95 313 469
1.5 Belanja Bantuan Sosial	8 854 616	33 852 355	32 012 617	48 119 962	52 141 750
1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	91 452 183	116 387 512	126 170 160	191 156 530	212 227 730
1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	114 606 492	145 099 081	198 646 101	216 289 003	234 132 969
1.8 Belanja Tidak Terduga	2 795 176	2 427 322	833 544	296 183	10 853 620
2 BELANJA LANGSUNG	660 079 791	415 849 495	513 018 013	1 065 550 455	1 267 235 545
2.1 Belanja Pegawai	40 654 954	36 538 227	51 806 056	63 448 807	75 694 058
2.2 Belanja Barang dan Jasa	174 410 507	203 008 445	261 507 743	374 395 948	424 829 297
2.3 Belanja Modal	445 014 330	176 302 823	199 704 214	627 705 700	766 712 190

(berlanjut...)

Tabel 12 (lanjutan...)
Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Badung Tahun 2009 - 2013
(ribu rupiah)

Rincian	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
C PEMBIAYAAN	539 385 560	390 887 861	478 845 039	614 687 764	688 998 737
1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	665 143 870	524 737 406	497 292 439	759 887 764	902 998 737
1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	415 143 870	524 737 406	497 292 439	757 401 952	901 461 570
1.2 Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0
1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah	250 000 000	0	0	0	0
1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0	0	0	0
1.6 Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	2 485 813	1 537 167
1.7 Lainnya	0	0	0	0	0
2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	125 758 310	133 849 545	18 447 400	145 200 000	214 000 000
2.1 Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	758 310	8 849 545	16 500 000	145 200 000	214 000 000
2.3 Pembayaran Pokok Utang	125 000 000	125 000 000	0	0	0
2.4 Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
2.5 Lainnya	0	0	1 947 400	0	0
D SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	524 782 881	497 292 439	757 401 952	899 302 668	888 201 986

Tabel 13 (berlanjut...)

Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gianyar Tahun 2009 - 2013
(ribu rupiah)

Rincian	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A PENDAPATAN DAERAH	702 688 056	771 595 588	834 194 082	1 066 239 511	1 248 415 648
1 PENDAPATAN ASLI DAERAH	112 380 711	153 617 896	175 273 316	261 222 178	319 612 005
1.1 Hasil Pajak Daerah	67 377 600	90 318 973	108 569 444	159 636 602	204 436 633
1.2 Hasil Retribusi Daerah	15 419 246	21 283 738	27 527 101	30 400 835	31 816 584
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2 595 320	5 094 245	5 339 119	5 340 708	7 247 310
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	26 988 545	36 920 940	33 837 652	65 844 032	76 111 478
2 DANA PERIMBANGAN	493 322 549	468 281 269	499 403 645	604 397 691	690 817 394
2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	28 590 470	37 025 383	23 427 453	35 584 490	36 365 388
2.2 Dana Alokasi Umum (DAU)	405 118 079	387 493 486	434 899 992	532 883 001	609 293 266
2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)	59 614 000	43 762 400	41 076 300	35 930 200	45 158 740
3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	96 984 796	149 696 423	159 517 121	200 619 642	237 986 249
3.1 Pendapatan Hibah	1 251 494	2 518 866	0	0	0
3.2 Dana Darurat	0	0	0	0	0
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	40 880 999	35 492 311	40 588 482	78 603 207	74 464 120
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	49 152 228	109 085 406	115 338 699	110 035 955	161 704 394
3.5 Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	5 700 075	2 599 740	3 589 940	11 980 481	1 817 735
3.6 Lain-lain Pendapatan yang Sah	0	0	0	0	0
B BELANJA DAERAH (1 + 2)	717 260 496	754 075 486	903 930 942	1 006 500 072	1 192 027 629
1 BELANJA TIDAK LANGSUNG	455 417 072	535 792 297	616 074 683	697 912 390	770 124 483
1.1 Belanja Pegawai	389 737 232	465 137 862	524 828 636	593 821 653	642 045 061
1.2 Belanja Bunga	3 677 118	2 199 009	1 074 200	20 833	89
1.3 Belanja Subsidi	1 261 212	999 840	2 818 320	2 831 540	2 848 695
1.4 Belanja Hibah	15 458 525	11 091 622	19 163 188	42 778 954	41 656 367
1.5 Belanja Bantuan Sosial	10 162 643	9 454 416	20 037 900	597 000	15 107 844
1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	3 363 825	18 051 789	21 587 446	24 171 698	27 839 464
1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	30 784 734	28 081 216	25 677 686	33 545 180	40 625 763
1.8 Belanja Tidak Terduga	971 783	776 543	887 307	0	1 200
2 BELANJA LANGSUNG	261 843 424	218 283 189	287 856 259	308 587 682	421 903 146
2.1 Belanja Pegawai	27 653 150	24 905 002	30 445 038	29 802 387	31 294 706
2.2 Belanja Barang dan Jasa	73 941 237	83 419 099	133 263 070	158 157 838	205 284 944
2.3 Belanja Modal	160 249 037	109 959 088	124 148 151	120 627 457	185 323 496

(berlanjut...)

Tabel 13 (lanjutan...)
Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gianyar Tahun 2009 - 2013
(ribu rupiah)

Rincian	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
C PEMBIAYAAN	70 639 999	57 158 723	69 736 860	89 010 275	143 249 714
1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	84 778 419	72 404 193	85 234 502	92 350 132	148 749 714
1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	84 778 419	65 970 203	74 604 802	92 350 132	148 749 714
1.2 Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0
1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0	0	0	0
1.6 Penerimaan Piutang Daerah	0	6 433 900	10 629 700	0	0
1.7 Lainnya	0	0	0	0	0
2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	14 138 420	15 245 470	15 497 642	3 339 857	5 500 000
2.1 Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2 134 900	2 000 000	3 000 000	3 000 000	5 500 000
2.3 Pembayaran Pokok Utang	12 003 520	12 003 520	11 981 972	339 857	0
2.4 Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
2.5 Lainnya	0	1 241 950	515 670	0	0
D SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	56 067 559	74 678 825	0	148 749 714	199 637 732

Tabel 14 (berlanjut...)

Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klungkung Tahun 2009 - 2013
(ribu rupiah)

Rincian	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A PENDAPATAN DAERAH	438 416 069	447 067 233	502 868 134	590 231 294	711 405 235
1 PENDAPATAN ASLI DAERAH	29 566 916	31 331 319	40 735 839	48 561 525	67 401 910
1.1 Hasil Pajak Daerah	2 052 333	3 683 646	5 017 639	3 480 972	13 234 733
1.2 Hasil Retribusi Daerah	19 108 043	20 122 660	26 782 629	0	10 597 832
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3 302 530	4 166 119	5 157 184	5 962 299	8 595 168
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5 104 010	3 358 894	3 778 387	39 118 525	34 974 178
2 DANA PERIMBANGAN	347 066 535	334 470 479	358 900 413	432 131 856	496 925 310
2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	17 297 508	19 309 184	16 878 856	19 970 390	19 967 531
2.2 Dana Alokasi Umum (DAU)	278 553 027	285 662 095	319 611 407	387 340 103	444 174 019
2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)	51 216 000	29 499 200	22 410 150	24 821 363	32 783 760
3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	61 782 618	81 265 435	103 231 882	109 537 913	147 078 015
3.1 Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0
3.2 Dana Darurat	0	0	0	0	0
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	45 053 973	43 301 250	54 250 528	59 623 497	75 819 536
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	6 463 650	36 410 125	47 715 909	43 179 357	70 411 164
3.5 Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	10 264 995	1 554 060	1 265 445	6 735 059	847 315
3.6 Lain-lain Pendapatan yang Sah	0	0	0	0	0
B BELANJA DAERAH	449 263 176	441 999 993	494 652 376	598 898 361	665 548 503
1 BELANJA TIDAK LANGSUNG	272 520 344	324 360 559	360 838 243	406 736 633	470 137 179
1.1 Belanja Pegawai	236 078 346	284 202 115	323 840 072	364 767 535	392 033 389
1.2 Belanja Bunga	0	0	0	0	0
1.3 Belanja Subsidi	0	0	0	0	0
1.4 Belanja Hibah	10 281 690	9 649 223	8 820 405	20 336 674	51 765 579
1.5 Belanja Bantuan Sosial	13 017 605	13 918 282	11 845 824	4 128 700	604 457
1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	379 802	338 954	538 256	793 983	207 220
1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	12 762 901	15 770 785	15 511 047	16 395 757	25 507 616
1.8 Belanja Tidak Terduga	0	481 200	282 639	313 983	18 918
2 BELANJA LANGSUNG	176 742 832	117 639 434	133 814 133	192 161 730	195 411 324
2.1 Belanja Pegawai	9 166 273	6 885 562	10 991 566	10 620 685	17 076 559
2.2 Belanja Barang dan Jasa	85 069 524	68 198 773	73 812 317	100 317 861	114 240 793
2.3 Belanja Modal	82 507 035	42 555 099	49 010 250	81 223 182	64 093 972

(berlanjut...)

Tabel 14 (lanjutan...)
Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klungkung Tahun 2009 - 2013
(ribu rupiah)

Rincian	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
C PEMBIAYAAN	66 527 462	54 405 355	58 442 594	64 623 353	52 846 285
1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	68 777 462	56 130 355	59 942 594	66 723 353	56 846 285
1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	68 777 462	55 680 355	59 472 594	66 658 353	55 956 285
1.2 Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0
1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0	470 000	65 000 000	0
1.6 Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	0
1.7 Lainnya	0	450 000	0	0	890 000
2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	2 250 000	1 725 000	1 500 000	2 100 000	4 000 000
2.1 Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2 250 000	1 725 000	1 500 000	2 100 000	4 000 000
2.3 Pembayaran Pokok Utang	0	0	0	0	0
2.4 Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
2.5 Lainnya	0	0	0	0	0
D SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	55 680 355	59 472 595	66 658 352	55 958 285	98 703 017

Tabel 15 (berlanjut...)

Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangli Tahun 2009 - 2013
(ribu rupiah)

Rincian	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A PENDAPATAN DAERAH	409 052 069	475 578 527	543 348 390	622 718 265	702 229 030
1 PENDAPATAN ASLI DAERAH	16 329 747	16 252 951	22 961 238	40 751 050	55 986 570
1.1 Hasil Pajak Daerah	2 579 287	2 978 312	3 811 440	6 107 125	7 679 636
1.2 Hasil Retribusi Daerah	7 108 908	7 738 565	12 652 617	10 101 009	11 302 691
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1 659 902	1 947 555	2 425 425	2 563 279	3 425 035
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	4 981 650	3 588 519	4 071 756	21 979 637	33 579 207
2 DANA PERIMBANGAN	342 429 089	345 929 609	372 313 517	459 413 969	513 012 768
2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	20 817 615	23 796 833	21 587 105	24 211 806	23 512 514
2.2 Dana Alokasi Umum (DAU)	276 000 474	292 695 476	321 381 411	396 942 913	450 812 694
2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)	45 611 000	29 437 300	29 345 000	38 259 250	38 687 560
3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	50 293 233	113 395 967	148 073 635	122 553 247	133 229 692
3.1 Pendapatan Hibah	6 629 700	0	0	0	0
3.2 Dana Darurat	0	0	0	0	0
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	40 615 218	13 104 517	51 507 846	72 005 747	76 161 491
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0	68 532 910	91 782 184	39 289 956	55 975 166
3.5 Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	3 048 315	1 758 540	4 783 605	11 257 543	1 043 035
3.6 Lain-lain Pendapatan yang Sah	0	0	0	0	50 000
B BELANJA DAERAH	427 050 829	470 699 913	531 823 076	592 232 375	652 343 659
1 BELANJA TIDAK LANGSUNG	287 644 627	334 731 059	366 223 973	395 736 957	475 739 271
1.1 Belanja Pegawai	227 589 666	275 042 471	305 727 749	345 288 250	371 523 272
1.2 Belanja Bunga	0	0	0	0	0
1.3 Belanja Subsidi	165 000	165 000	165 000	1 415 000	165 000
1.4 Belanja Hibah	5 357 558	15 064 013	7 022 751	6 479 550	32 678 300
1.5 Belanja Bantuan Sosial	32 795 097	17 846 273	15 517 355	0	2 264 325
1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	21 737 306	0	1 573 292	1 787 335	1 972 462
1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0	25 615 927	35 104 501	40 555 934	67 135 912
1.8 Belanja Tidak Terduga	0	997 375	1 113 325	210 887	0
2 BELANJA LANGSUNG	139 406 202	135 968 854	165 599 103	196 495 419	176 604 387
2.1 Belanja Pegawai	19 833 258	15 306 646	18 789 138	19 555 794	20 116 995
2.2 Belanja Barang dan Jasa	71 425 167	52 053 622	45 382 098	94 598 698	93 724 429
2.3 Belanja Modal	48 147 777	68 608 586	101 427 867	82 340 927	62 762 964

(berlanjut...)

Tabel 15 (lanjutan...)
Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangli Tahun 2009 - 2013
(ribu rupiah)

Rincian	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
C PEMBIAYAAN	65 651 699	53 590 211	56 335 538	23 647 021	- 3 694 086
1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	65 651 699	54 390 211	58 911 538	24 780 384	675 000
1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	57 132 117	47 582 803	58 380 361	24 780 384	0
1.2 Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0
1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0	484 260	0	675 000
1.6 Penerimaan Piutang Daerah	8 519 582	6 807 408	46 917	0	0
1.7 Lainnya	0	0	0	0	0
2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	0	800 000	2 576 000	1 133 363	4 369 086
2.1 Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0	800 000	2 576 000	500 000	4 000 000
2.3 Pembayaran Pokok Utang	0	0	0	633 363	369 086
2.4 Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
2.5 Lainnya	0	0	0	0	0
D SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	47 652 939	58 468 825	67 860 852	54 132 911	46 191 286

Tabel 16 (berlanjut...)

Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karangasem Tahun 2009 - 2013
(ribu rupiah)

Rincian	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A PENDAPATAN DAERAH	612 417 553	673 678 128	820 520 892	907 014 578	1 041 577 611
1 PENDAPATAN ASLI DAERAH	47 842 960	62 696 409	129 556 195	144 019 629	168 652 790
1.1 Hasil Pajak Daerah	27 879 149	33 221 964	82 210 999	92 776 781	103 841 036
1.2 Hasil Retribusi Daerah	7 376 861	8 203 446	7 925 193	10 977 702	11 991 692
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6 600 713	7 460 386	8 747 794	11 470 823	15 235 409
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5 986 237	13 810 613	30 672 209	28 794 323	37 584 653
2 DANA PERIMBANGAN	438 520 578	457 801 432	478 284 989	578 456 232	644 192 869
2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	25 131 095	26 929 568	26 742 874	28 662 642	29 001 444
2.2 Dana Alokasi Umum (DAU)	356 681 483	374 537 064	409 812 715	503 028 930	563 981 785
2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)	56 708 000	56 334 800	41 729 400	46 764 660	51 209 640
3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	126 054 015	153 180 287	212 679 708	184 538 717	228 731 952
3.1 Pendapatan Hibah	0	1 134 954	397 723	429 804	425 450
3.2 Dana Darurat	0	0	0	0	0
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	61 709 068	67 313 104	61 259 778	65 109 846	66 786 104
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	60 523 577	81 921 529	127 564 038	80 380 941	116 152 134
3.5 Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	3 821 370	2 810 700	23 439 789	38 546 911	45 360 033
3.6 Lain-lain Pendapatan yang Sah	0	0	18 380	71 215	8 231
B BELANJA DAERAH	658 369 985	657 929 594	801 321 516	942 886 355	1 078 485 761
1 BELANJA TIDAK LANGSUNG	405 371 746	504 260 650	538 842 892	599 322 204	688 108 423
1.1 Belanja Pegawai	350 070 224	432 609 525	463 166 153	514 003 615	576 905 293
1.2 Belanja Bunga	175 390	159 799	144 207	2 225 028	3 421 036
1.3 Belanja Subsidi	0	0	0	0	0
1.4 Belanja Hibah	5 208 861	16 932 356	9 527 144	34 230 533	41 429 597
1.5 Belanja Bantuan Sosial	20 081 383	16 160 600	25 860 500	252 000	2 489 140
1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	7 402 862	6 958 627	12 292 812	13 745 818	16 715 617
1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	21 047 667	29 725 153	27 238 540	32 707 087	44 047 141
1.8 Belanja Tidak Terduga	1 385 359	1 714 590	613 536	2 158 123	3 100 599
2 BELANJA LANGSUNG	252 998 239	153 668 944	262 478 624	343 564 151	390 377 338
2.1 Belanja Pegawai	20 046 498	7 075 684	14 051 897	14 801 229	18 845 308
2.2 Belanja Barang dan Jasa	91 169 410	69 085 306	129 589 778	157 131 972	190 794 382
2.3 Belanja Modal	141 782 331	77 507 954	118 836 949	171 630 950	180 737 648

(berlanjut...)

Tabel 16 (lanjutan...)
Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karangasem Tahun 2009 - 2013
(ribu rupiah)

Rincian	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
C PEMBIAYAAN	101 138 556	56 219 686	65 809 179	116 459 534	138 305 125
1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	104 022 270	65 641 103	72 129 344	120 763 210	147 340 373
1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	0	65 599 674	71 968 220	85 008 554	80 587 755
1.2 Pencairan Dana Cadangan	104 022 270	0	142 667	5 683 029	0
1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0
1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	30 052 577	65 744 496
1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0	0	0	1 000 000
1.6 Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	8 122
1.7 Lainnya	0	41 429	18 457	19 050	0
2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	2 883 714	9 421 417	6 320 165	4 303 676	9 035 248
2.1 Pembentukan Dana Cadangan	1 244 267	175 000	4 255 733	325 695	0
2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1 014 000	9 246 417	1 500 000	3 847 108	3 000 000
2.3 Pembayaran Pokok Utang	625 447	0	564 432	130 873	6 035 248
2.4 Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
2.5 Lainnya	0	0	0	0	0
D SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	55 186 124	71 968 220	85 008 555	80 587 757	101 396 975

Tabel 17 (berlanjut...)

Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buleleng Tahun 2009 - 2013
(ribu rupiah)

Rincian	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A PENDAPATAN DAERAH	770 534 267	852 341 270	1 054 706 126	1 196 436 251	1 390 657 293
1 PENDAPATAN ASLI DAERAH	63 487 192	86 962 002	109 167 026	129 003 995	160 292 011
1.1 Hasil Pajak Daerah	16 402 386	19 837 345	32 385 332	39 124 665	57 770 211
1.2 Hasil Retribusi Daerah	37 126 191	10 370 221	11 185 897	13 132 938	14 872 963
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5 959 053	6 657 580	7 954 471	9 369 948	12 732 894
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	3 999 562	50 096 856	57 641 326	67 376 444	74 915 942
2 DANA PERIMBANGAN	592 138 209	623 176 277	660 585 990	793 541 645	907 851 103
2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	35 614 408	44 659 863	37 735 330	43 254 749	44 119 859
2.2 Dana Alokasi Umum (DAU)	506 292 801	512 748 214	568 131 660	687 697 696	796 419 224
2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)	50 231 000	65 768 200	54 719 000	62 589 200	67 312 020
3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	114 908 866	142 202 991	234 953 110	273 890 611	322 514 179
3.1 Pendapatan Hibah	7 193 456	0	0	0	0
3.2 Dana Darurat	0	0	0	0	0
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	70 167 496	63 989 733	105 404 153	129 243 140	131 792 220
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	17 555 175	72 218 756	171 262 766	126 021 617	186 572 702
3.5 Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	19 992 739	5 141 980	7 392 180	17 662 272	3 208 921
3.6 Lain-lain Pendapatan yang Sah	0	852 522	894 011	963 582	940 336
B BELANJA DAERAH	773 426 474	837 540 995	1 038 052 441	1 123 510 074	1 413 380 933
1 BELANJA TIDAK LANGSUNG	524 675 510	641 017 340	715 826 155	830 820 428	944 333 238
1.1 Belanja Pegawai	468 317 118	582 860 465	633 464 123	725 807 231	828 895 332
1.2 Belanja Bunga	240 292	156 886	120 748	86 681	52 092
1.3 Belanja Subsidi	0	0	0	0	0
1.4 Belanja Hibah	15 237 791	9 885 700	20 152 435	47 719 209	36 751 500
1.5 Belanja Bantuan Sosial	9 908 130	8 518 700	6 298 700	1 512 000	4 618 811
1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	3 777 118	2 749 994	2 999 963	3 999 969	3 930 092
1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	25 865 697	36 421 410	49 801 844	51 154 442	69 352 870
1.8 Belanja Tidak Terduga	1 329 364	424 185	2 988 342	540 895	732 540
2 BELANJA LANGSUNG	248 750 964	196 523 655	322 226 286	292 689 646	469 047 695
2.1 Belanja Pegawai	21 309 476	19 384 830	20 241 527	19 591 457	30 365 373
2.2 Belanja Barang dan Jasa	124 999 450	129 931 255	180 088 848	193 664 351	252 785 605
2.3 Belanja Modal	102 442 038	47 207 570	121 895 911	79 433 838	185 896 717

(berlanjut...)

Tabel 17 (lanjutan...)
Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buleleng Tahun 2009 - 2013
(ribu rupiah)

Rincian	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
C PEMBIAYAAN	57 485 122	48 165 069	59 166 101	73 018 042	134 355 572
1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	59 534 281	48 489 313	60 467 845	75 819 786	145 944 219
1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	59 534 281	48 489 313	60 467 845	75 819 786	145 944 219
1.2 Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0
1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0	0	0	0
1.6 Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	0
1.7 Lainnya	0	0	0	0	0
2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	2 049 159	3 24 244	1 301 744	2 801 744	11 588 647
2.1 Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1 700 000	2 500	1 000 000	2 500 000	11 315 946
2.3 Pembayaran Pokok Utang	349 159	321 744	301 744	301 744	272 701
2.4 Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
2.5 Lainnya	0	0	0	0	0
D SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	54 592 915	62 965 344	75 819 786	145 944 219	111 631 932

Tabel 18 (berlanjut...)
Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Denpasar Tahun 2009 - 2013
(ribu rupiah)

Rincian	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A PENDAPATAN DAERAH	821 150 416	903 834 642	1 150 071 695	1 379 049 166	1 547 605 213
1 PENDAPATAN ASLI DAERAH	215 156 916	257 899 898	424 959 413	511 326 621	658 974 707
1.1 Hasil Pajak Daerah	146 077 325	169 581 466	326 282 112	377 247 592	504 981 564
1.2 Hasil Retribusi Daerah	20 933 983	26 191 507	24 424 894	43 772 750	47 874 288
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5 616 363	7 831 445	10 417 779	18 489 907	20 774 563
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	42 529 245	54 295 480	63 834 628	71 816 372	85 344 292
2 DANA PERIMBANGAN	522 496 003	499 195 167	491 014 027	655 349 185	661 103 049
2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	127 566 735	148 634 015	106 085 023	134 193 389	72 201 429
2.2 Dana Alokasi Umum (DAU)	360 011 268	336 125 552	381 372 204	512 666 446	580 807 702
2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)	34 918 000	14 435 600	3 586 800	8 489 350	8 093 918
3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	83 497 497	146 739 577	234 098 255	212 373 359	227 527 456
3.1 Pendapatan Hibah	10 172 217	32 202 367	4 782 530	3 273 529	1 487 687
3.2 Dana Darurat	0	0	0	0	0
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	61 986 995	63 523 804	86 779 089	105 202 989	98 076 351
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0	49 790 686	141 271 936	89 705 986	127 408 208
3.5 Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	11 295 399	1 222 700	1 264 700	14 190 855	555 210
3.6 Lain-lain Pendapatan yang Sah	42 886	0	0	0	0
B BELANJA DAERAH	783 748 139	938 613 724	1 100 129 048	1 309 529 832	1 537 883 625
1 BELANJA TIDAK LANGSUNG	469 534 859	605 616 341	680 575 385	700 414 759	800 979 096
1.1 Belanja Pegawai	391 397 932	507 665 800	562 668 706	607 158 432	672 344 600
1.2 Belanja Bunga	0	0	0	0	0
1.3 Belanja Subsidi	0	348 000	0	0	0
1.4 Belanja Hibah	21 019 463	24 677 679	40 769 624	27 591 357	58 971 605
1.5 Belanja Bantuan Sosial	23 920 975	21 955 507	15 383 363	0	218 635
1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	7 980 000	10 986 253	18 987 618	19 187 618	21 544 000
1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	22 893 325	39 238 715	41 893 802	46 181 343	38 776 154
1.8 Belanja Tidak Terduga	2 323 164	744 387	872 272	296 008	9 124 102
2 BELANJA LANGSUNG	319 213 280	332 997 383	419 553 663	609 115 073	736 904 529
2.1 Belanja Pegawai	29 636 347	26 507 781	35 505 711	50 005 352	50 422 357
2.2 Belanja Barang dan Jasa	201 198 593	240 733 240	295 276 291	352 966 007	432 473 820
2.3 Belanja Modal	88 378 340	65 756 362	88 771 661	206 143 714	254 008 353

(berlanjut...)

Tabel 18 (lanjutan...)
Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Denpasar Tahun 2009 - 2013
(ribu rupiah)

Rincian	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
C PEMBIAYAAN	159 526 230	190 928 508	155 893 597	188 277 555	212 643 283
1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	168 176 034	191 928 508	158 393 597	205 911 244	257 805 713
1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	168 176 034	191 928 508	156 149 426	205 836 244	257 796 739
1.2 Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0
1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0	0	75 000	8 974
1.6 Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	0
1.7 Lainnya	0	0	2 244 171	0	0
2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	8 649 804	1 000 000	2 500 000	17 633 689	45 162 430
2.1 Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	6 400 000	1 000 000	2 500 000	17 633 689	45 054 173
2.3 Pembayaran Pokok Utang	2 249 804	0	0	0	108 256
2.4 Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
2.5 Lainnya	0	0	0	0	0
D SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	191 928 507	156 149 426	205 836 244	257 796 889	222 364 872

Tabel 19 (berlanjut...)
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota Se-Bali Tahun 2009 - 2013
(ribu rupiah)

Rincian	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A PENDAPATAN DAERAH	5 643 061 654	5 937 314 243	6 951 553 208	8 703 171 321	10 201 244 206
1 PENDAPATAN ASLI DAERAH	1 114 113 667	1 477 961 582	1 647 848 273	2 374 267 917	3 223 494 053
1.1 Hasil Pajak Daerah	830 773 942	1 095 154 044	1 198 237 774	1 777 314 867	2 503 361 648
1.2 Hasil Retribusi Daerah	133 409 061	130 261 905	133 346 753	146 443 868	213 582 870
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	47 225 670	55 781 675	72 415 025	89 407 759	103 478 429
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	102 704 994	196 763 958	243 848 721	361 101 423	403 071 108
2 DANA PERIMBANGAN	3 967 121 185	3 818 182 907	4 170 357 102	5 023 533 863	5 555 190 693
2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	336 100 073	433 298 168	496 517 777	364 295 265	267 227 243
2.2 Dana Alokasi Umum (DAU)	3 182 789 112	3 059 667 939	3 396 200 925	4 344 735 578	4 932 190 390
2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)	448 232 000	325 216 800	277 638 700	314 503 020	354 773 060
3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	561 826 802	641 169 754	1 133 347 833	1 305 369 541	1 423 529 459
3.1 Pendapatan Hibah	10 418 508	65 084 395	113 065 787	5 108 512	2 108 512
3.2 Dana Darurat	4 000 000	9 900 620	0	0	0
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	317 150 609	382 128 830	470 507 824	656 644 316	733 498 902
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	113 304 456	110 064 312	497 266 922	549 428 150	587 744 986
3.5 Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	114 341 929	49 037 122	51 739 130	70 142 011	71 248 877
3.6 Lain-lain Pendapatan yang Sah	2 611 300	24 954 475	768 170	24 046 552	28 958 182
B BELANJA DAERAH	6 412 118 059	6 526 763 790	7 662 981 895	9 255 009 021	11 020 034 194
1 BELANJA TIDAK LANGSUNG	3 933 363 627	4 739 252 117	5 332 012 248	5 936 235 348	6 652 345 883
1.1 Belanja Pegawai	3 233 060 505	3 739 824 381	4 397 461 005	4 931 191 044	5 395 586 792
1.2 Belanja Bunga	20 428 957	9 957 841	1 459 200	1 540 050	8 325 000
1.3 Belanja Subsidi	3 833 474	3 259 128	3 823 320	3 643 320	6 127 920
1.4 Belanja Hibah	162 775 535	310 500 372	210 283 373	231 319 853	274 918 632
1.5 Belanja Bantuan Sosial	120 216 789	129 495 260	110 593 727	50 625 905	86 506 692
1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	94 184 679	135 970 047	184 250 213	205 766 515	276 242 047
1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	282 785 113	393 925 269	410 381 437	497 937 805	592 823 537
1.8 Belanja Tidak Terduga	16 078 575	16 319 819	13 759 973	14 210 856	13 815 354
2 BELANJA LANGSUNG	2 478 754 432	1 787 511 673	2 330 969 647	3 318 773 673	4 367 688 311
2.1 Belanja Pegawai	213 457 311	168 451 504	174 156 308	243 018 028	298 217 409
2.2 Belanja Barang dan Jasa	969 216 504	981 617 778	1 219 485 451	1 508 410 731	1 979 102 679
2.3 Belanja Modal	1 296 080 617	637 442 391	937 327 888	1 567 344 914	2 090 368 225

(berlanjut...)

Tabel 19 (lanjutan...)
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota Se-Bali Tahun 2009 - 2013
(ribu rupiah)

Rincian	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
C PEMBIAYAAN	774 638 326	589 468 720	712 161 346	552 537 284	818 789 988
1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	920 830 168	748 351 035	748 846 575	722 846 001	998 019 191
1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	637 830 168	715 351 035	736 372 111	612 973 751	924 799 768
1.2 Pencairan Dana Cadangan	0	0	5 537 204	5 357 333	0
1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0
1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah	250 000 000	0	0	98 349 792	65 817 423
1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0	0	168 125	0
1.6 Penerimaan Piutang Daerah	28 500 000	28 500 000	0	0	0
1.7 Lainnya	4 500 000	4 500 000	6 937 260	5 997 000	7 402 000
2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	146 191 842	158 852 315	36 685 229	170 308 717	179 229 203
2.1 Pembentukan Dana Cadangan	675 000	0	14 092 375	312 979	0
2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	131 241 356	7 549 200	13 050 000	162 667 864	158 152 203
2.3 Pembayaran Pokok Utang	9 775 486	146 833 115	1 367 454	1 230 874	14 880 000
2.4 Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	997 000
2.5 Lainnya	4 500 000	4 500 000	8 175 400	6 097 000	5 200 000
D SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	5 581 921	19 173	732 659	699 584	0

Tabel 20 (berlanjut...)
Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota Se-Bali Tahun 2009 - 2013
(ribu rupiah)

Rincian	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A PENDAPATAN DAERAH	6 336 515 245	6 812 723 166	8 211 045 889	10 088 101 899	11 594 914 803
1 PENDAPATAN ASLI DAERAH	1 462 727 821	1 730 219 212	2 491 327 749	3 234 837 394	4 033 937 196
1.1 Hasil Pajak Daerah	1 063 690 089	1 224 455 890	1 879 794 777	2 425 191 973	3 023 268 641
1.2 Hasil Retribusi Daerah	160 652 664	163 135 587	171 374 956	212 622 993	267 212 471
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	51 742 962	70 065 806	83 637 314	103 732 028	151 344 279
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	186 642 106	272 561 929	356 520 702	493 290 671	592 111 803
2 DANA PERIMBANGAN	4 091 711 546	3 935 431 419	4 072 271 337	5 159 769 746	5 596 112 229
2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	449 191 323	550 546 380	407 374 229	508 804 935	325 790 657
2.2 Dana Alokasi Umum (DAU)	3 194 288 223	3 059 667 939	3 394 837 183	4 344 735 578	4 932 190 394
2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)	448 232 000	325 217 100	270 659 325	306 229 233	338 131 178
3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	782 075 878	1 147 072 535	1 647 146 803	1 693 494 756	1 964 865 375
3.1 Pendapatan Hibah	33 581 519	35 856 307	5 269 878	3 703 333	1 913 137
3.2 Dana Darurat	0	0	0	0	0
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	447 780 106	464 482 283	604 835 526	804 348 083	820 855 748
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	139 776 980	575 696 222	968 660 455	735 116 895	1 049 133 048
3.5 Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	82 310 530	33 745 788	52 669 142	126 007 097	63 006 693
3.6 Lain-lain Pendapatan yang Sah	73 626 743	37 291 929	16 011 802	24 319 350	29 956 749
B BELANJA DAERAH	6 423 628 810	6 729 761 222	7 871 427 496	9 637 897 109	11 212 370 583
1 BELANJA TIDAK LANGSUNG	3 984 486 908	4 792 069 846	5 334 878 598	6 022 475 445	6 862 963 760
1.1 Belanja Pegawai	3 188 645 988	3 905 186 072	4 338 243 729	4 887 592 384	5 409 740 704
1.2 Belanja Bunga	15 628 077	6 824 882	1 420 568	2 404 860	3 536 047
1.3 Belanja Subsidi	1 905 311	2 300 955	3 523 320	5 156 540	5 103 695
1.4 Belanja Hibah	203 735 363	173 563 771	179 746 222	676 897 728	407 868 567
1.5 Belanja Bantuan Sosial	146 197 801	150 308 453	150 834 513	54 669 662	86 554 000
1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	137 747 679	174 022 023	191 540 172	266 058 559	299 064 671
1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	283 493 098	370 947 293	460 474 371	523 458 813	624 013 714
1.8 Belanja Tidak Terduga	11 133 591	8 916 397	9 095 703	6 091 363	27 082 362
2 BELANJA LANGSUNG	2 435 141 902	1 937 691 376	2 536 548 898	3 615 421 668	4 349 406 821
2.1 Belanja Pegawai	191 674 397	154 859 651	201 578 570	249 165 201	290 207 941
2.2 Belanja Barang dan Jasa	996 944 881	1 028 864 973	1 393 239 190	1 723 813 853	2 088 913 691
2.3 Belanja Modal	1 246 522 624	753 966 752	941 731 138	1 642 442 612	1 970 285 191

(berlanjut...)

Tabel 20 (lanjutan...)
Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota Se-Bali Tahun 2009 - 2013
(ribu rupiah)

Rincian	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
C PEMBIAYAAN	1 118 939 716	953 904 810	1 050 156 055	1 296 699 140	1 462 976 264
1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	1 279 247 158	1 128 442 836	1 103 777 041	1 482 789 504	1 770 309 710
1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	905 705 306	1 110 210 009	1 084 740 869	1 439 044 110	1 694 929 768
1.2 Pencairan Dana Cadangan	104 022 270	0	142 667	5 683 029	0
1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0
1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah	256 500 000	0	0	30 052 577	65 744 496
1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0	954 260	65 135 120	1 796 699
1.6 Penerimaan Piutang Daerah	8 519 582	13 241 398	10 676 617	2 485 813	1 545 289
1.7 Lainnya	4 500 000	4 991 429	7 262 628	5 323 855	6 293 458
2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	160 307 442	174 539 026	53 620 986	186 090 364	307 333 446
2.1 Pembentukan Dana Cadangan	1 244 267	175 000	4 255 733	1 625 695	0
2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	14 257 210	23 623 462	28 976 000	177 980 797	295 270 119
2.3 Pembayaran Pokok Utang	140 305 965	143 905 264	12 926 183	1 483 872	6 863 326
2.4 Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
2.5 Lainnya	4 500 000	6 834 300	7 463 070	5 000 000	5 200 000
D SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	1 031 826 151	1 036 866 754	1 389 774 448	1 746 905 929	1 845 520 484

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI BALI

Jl. Raya Puputan No. 1 Renon, Denpasar- 80226

Telp: (0361) 238159, Fax : 238162

E-mail : bps5100@bps.go.id

Homepage: <http://bali.bps.go.id>